

152<sup>y</sup> x 40 = 40

Des 2012

**KETAHANAN PANGAN  
RUMAHTANGGA PERDESAAN**

ARUS TIMUR

# Ketahanan Pangan

Rumahtangga Perdesaan



Sitti Bulkis

---

atalog Dalam Terbitan (KDT)  
KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA PERDESAAN—Makassar :2012  
xii + 284 hal.; 15,5 x 23 cm

Hak Cipta © 2012 pada Penulis

---

Hak penerbitan pada ARUS TIMUR. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apa pun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan penerbit ARUS TIMUR.

Penulis : Sitti Bulkis  
Tim Kreatif : Andi Wanua Tangke  
Anwar Nasyaruddin  
Desain Cover & Isi : djanoerkoening

Diterbitkan pertama kali oleh:

**ARUS TIMUR**  
*Enak Dibaca Dan Berkah!*

Jln. Abdullah Dg. Sirua  
Perum. Swadaya Mas/7 Makassar  
Telp. 0411-494086 - 5047064 - 490338  
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172  
Email: arusbook@yahoo.co.id

Redaksi & Pemasaran:  
(Rumah Buku Andi Wanua)  
Jln. Tamangapa Raya III  
Perum. Tritura A5 No.10 Makassar 90235  
Telp. 0411-494086, 5047064.  
Fax. 0411-494086, Hp. 081342183116

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
All Right Reserved  
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Sulsel  
Cetakan I, 2012

ISBN: 978-602-9057-27-0

## KATA PENGANTAR

Pada awalnya, ketika saya menempuh pendidikan S3 pada Program Pascasarjana UNHAS, pada semester tiga memprogramkan mata kuliah "*food system*" sekitar akhir Tahun 1998, dari diskusi lepas dengan Prof. Dr. Elly Ishak sebagai salah dosen pada mata kuliah tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk mengkaji "ketahanan pangan rumahtangga" sebagai topik penelitian disertasi.

Selanjutnya, dari hasil pencarian referensi dan diskusi-diskusi, saya tiba pada kesimpulan betapa penting dan perlunya pengkajian tentang ketahanan pangan rumahtangga.

Pangan adalah komodita strategis, karena menjadi kebutuhan dasar manusia. Pangan tidak saja penting secara strategis dan ekonomi, tetapi juga dari segi pertahanan dan keamanan, dan dari segi sosial dan politik. Pengalaman menunjukkan bahwa ketahanan dan ketentraman sesuatu negara amat ditentukan oleh ketersediaan pangan. Oleh karena itu pangan tak dapat diabaikan untuk eksistensi dan perkembangan suatu negara.

Di dalam GBHN 1999 dan 2004 yang dijabarkan kedalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dikatakan bahwa pangan adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar untuk pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sejak dari janin hingga lanjut usia. Dengan demikian pembangunan pangan adalah bagian

pembangunan nasional dalam upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan penyediaan pangan, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang diarahkan kepada peningkatan dan penganeekaragaman dalam penyediaan dan konsumsi pangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan produksi beras melalui pelaksanaan program intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi, upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan tercapainya swasembada pangan pada tahun 1984.

Selain usaha-usaha diatas, pemerintah juga menerapkan program kebijaksanaan cadangan pangan dan perdagangan pangan melalui kebijakan harga pangan. Stabilitas harga pangan telah mampu memacu adopsi teknologi maju, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, serta konsumsi pangan dan perbaikan gizi masyarakat terus mengalami peningkatan secara konsisten (Suryana dan Budiarto, 1998:147).

Dengan tingkat produksi yang telah dicapai dan kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah, data Tahun 2008 menunjukkan ketersediaan energi rata-rata penduduk Indonesia mencapai 3.056 kilokalori/kapita/hari dan Angka Ketersediaan Protein sebanyak 81,20 gram/kapita/hari. Hal ini berarti melampaui kecukupan ketersediaan energi berdasarkan Pola Pangan Harapan sebanyak 2200 kilokalori/orang/hari dan Angka Kecukupan Protein sebanyak 55 gram/orang/hari (LIPI, 2004). Secara umum konsumsi energi rata-rata semakin mendekati kebutuhan sebesar 2000 kkal/kap/hari, dan pada tahun 2007 bahkan telah memenuhi angka kecukupan dengan rata - rata konsumsi energi sebesar 2015 kkal/kap atau 100.7% dari angka kecukupan energi. Pada Tahun 2007, konsumsi energi di wilayah pedesaan 2067 kkal/kap/hari (103.3% AKE), sementara di kota 1996 kkal/kap/hr (99.8 % AKE). Akan halnya protein, konsumsi protein sebesar 57,49 gr/kapita/hari, telah melebihi angka anjuran sebesar 52 gr/kapita/hari.

Namun demikian, bukan berarti bahwa tidak ada masalah ketahanan pangan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Pada tahun 2009 terdapat 100 kabupaten yang masih dalam kategori rawan pangan.

Hal ini terasa janggal mengingat Indonesia memiliki potensi yang luar biasa secara geografis dan juga sudah dimasukkannya ketahanan pangan dalam alokasi anggaran negara. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut.

Hasil rumusan Internasional Congress of Nutrition (ICN) yang diselenggarakan di Roma tahun 1992 mendefinisikan ketahanan pangan rumah tangga (*household food security*) adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dalam jumlah, mutu, dan ragam yang seimbang dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara produktif “

Dengan definisi tersebut, oleh Ahmad Suryana (2004) menyatakan bahwa aspek pembangunan ketahanan pangan menjadi sangat luas, mulai dari aspek ketersediaan pangan (jumlah harus cukup dan dapat diakses oleh rumah tangga), aspek distribusi (merata dalam arti fisik dan terjangkau dalam arti ekonomi, yang terkait dengan isu harga dan daya beli) dan aspek konsumsi (mutunya memenuhi kaidah kecukupan gizi yang beragam dan seimbang, aman dari ukuran kesehatan, serta halal dari kriteria agama Islam). Untuk mencapai kesemuanya itu, pemerintah tidak dapat melakukan sendiri, tetapi sesuai dengan amanat Undang-Undang Pangan, perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dunia usaha di dalamnya, dapat berusaha secara efisien dan berdaya saing mulai dari kegiatan memproduksinya, mempertukarkannya atau memperdagangkannya, serta mengkonsumsinya. Dengan demikian, kata kuncinya adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam perwujudan ketahanan pangan rumah tangga.

Dalam upaya pengembangan ketahanan pangan rumah tangga, pengkajian tentang masalah ketahanan pangan masih sangat perlu dilakukan terutama apabila dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Secara lebih universal, dalam data yang disajikan berbagai sumber jumlah penduduk dunia hingga akhir Tahun 2011 diperkirakan telah menembus angka 7 miliar jiwa. Hal

ini cukup mencengangkan dan menghawatirkan sejumlah pengamat pangan, dikarenakan jumlah angka pertumbuhan penduduk dunia yang tidak sebanding lurus dengan jumlah peningkatan angka pertumbuhan lahan pertanian dan produksi hasil pertanian yang berimbang di sejumlah negara berkembang di seluruh dunia. Tingkat pertumbuhan populasi penduduk dunia yang cukup tinggi ditambah dengan perbaikan tingkat harapan hidup manusia yang mencapai usia lebih tua dalam kurun waktu 1 abad terakhir, telah menggiring berbagai aksi manusia yang mencoba mendesak alam menuju titik batas kewajarannya. Tindakan-tindakan pendesakkan menuju titik batas kewajaran tersebut dapat mengakibatkan hal-hal yang berdampak negatif kehidupan manusia di masa mendatang antara lain, yaitu : 1). Rusaknya sumber persediaan air bersih baik untuk konsumsi maupun pengembangan sektor pertanian, akibat pergeseran alih fungsi lahan yang dilakukan secara sembarangan; 2) Rusaknya rantai ekosistem alam yang menyebabkan beberapa flora dan fauna penyeimbang alam menjadi rusak (terkontaminasi negatif) dan bahkan hilang akibat pencemaran dan perburuan secara membabi buta yang dilakukan oleh manusia, dan 3) rusaknya tingkat komposisi dan kesuburan tanah pertanian akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang dilakukan secara berlebihan (Sugeng Setya Cahyanto, dkk, 2011).

Buku *Ketahanan Pangan Rumah tangga Di Perdesaan* ini didasari oleh pemikiran bahwa ke depan penting dan perlu untuk senantiasa melakukan pengkajian tentang ketahanan pangan rumah tangga dalam upaya mengembangkan ketahanan pangan rumah tangga sehingga ketika rumah tangga (semua anggota rumah tangga) sudah "tahan pangan" kita dapat berharap kualitas sumberdaya manusia dapat meningkat. Data dan Informasi yang digunakan dalam buku ini merupakan hasil penelitian disertasi penulis (Tahun 2004), yang dilengkapi dengan beberapa teori yang diacu dan penggunaan perpaduan metode kuantitatif dan kualitatif dalam upaya memahami ketahanan pangan rumah tangga pada tiga tipe agrosistem (Sawah, Dataran Tinggi, dan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil) di perdesaan. Hasil penelitian yang komprehensif dari segi pangan dan gizi, sosiologis, metodologis, cakupan wilayahnya, yang telah dijadikan referensi oleh

mahasiswa-mahasiswa S1, S2 dan S3 yang tertarik mengkaji masalah ketahanan pangan khususnya di UNHAS, dianggap layak dan perlu dipublikasikan dalam bentuk buku dengan sebersit harapan untuk dijadikan referensi oleh kalangan yang lebih luas.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Kepada guru-guru saya Bapak Prof. Dr. M. Arifin Sallatang, Prof. Dr. Ir. M. Saleh S. Ali, M.Sc dan Prof. Dr. Dr. Razak Thaha, M.Sc, yang dengan tekun dan kesabarannya telah memberikan arahan dan wawasan teoritik dan metodologik. Kepada semua dosen pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian UNHAS yang selama ini telah menjadi teman diskusi yang baik.

Khusus untuk suami (Ir. Osman Nagga) dan anak-anakku (Arif, Ardi, Fira dan Aslam), terima kasih banyak atas dukungannya dan buku ini kepersembahkan kepada kalian.

Makassar, September 2012

**Sitti Bulkis D. Osman**



## Isi Buku

Kata Pengantar ~ v  
Isi Buku ~ xi

- Bab I Ketahanan Pangan: Apa Masalahnya? ~ 1
- Bab II Teori-Teori dalam Memahami Ketahanan Pangan Rumah Tangga ~ 9
- Bab III Kerangka Teoritik dan Hipotesis ~ 33
- Bab IV Perpaduan Metode Kuantitatif dan Kualitatif ~ 45
- Bab V Keadaan Umum Lokasi Penelitian dan Karakteristik Rumahtangga ~ 67
- Bab VI Ketahanan Pangan Rumahtangga pada Tipe Agroekosistem Sawah ~ 91
- Bab VII Ketahanan Pangan Rumahtangga pada Tipe Agroekosistem Lahan Kering ~ 145
- Bab VIII Ketahanan Pangan Rumahtangga pada Tipe Agroekosistem Pantai & Pulau-Pulau Kecil ~ 205
- Bab IX Ketahanan Pangan Antar Tipe Agroekosistem ~ 257
- Bab X ~ Kesimpulan dan Saran ~ 269

Daftar Pustaka ~ 273  
Tentang Penulis ~ 283



## KETAHANAN PANGAN: APA MASALAHNYA?



### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pangan adalah komoditas strategis, karena menjadi kebutuhan dasar manusia.

Pangan tidak saja penting secara strategis dan ekonomi, tetapi juga dari segi pertahanan dan keamanan, dan dari segi sosial dan politik. Pengalaman menunjukkan bahwa ketahanan dan ketentraman sesuatu negara amat ditentukan oleh ketersediaan pangan. Oleh karena itu pangan tak dapat diabaikan untuk eksistensi dan perkembangan suatu negara.

Di dalam GBHN 1999 dan 2004 yang dijabarkan kedalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dikatakan bahwa pangan adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar untuk pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sejak dari janin hingga lanjut usia. Dengan demikian pembangunan pangan adalah bagian pembangunan nasional dalam upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan penyediaan pangan, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang diarahkan kepada peningkatan dan penganekaragaman dalam penyediaan dan konsumsi pangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan produksi beras melalui pelaksanaan program intensifikasi, ekstensifikasi, rehabi-

litasi dan diversifikasi, upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan tercapainya swasembada pangan pada tahun 1984.

Hasan (1994 dalam Erwidodo, dkk., 1999:1-2) mengatakan bahwa keberhasilan peningkatan produksi beras, orientasi pembangunan pangan perlu diperluas, tidak hanya swasembada beras tetapi swasembada pangan secara keseluruhan melalui reorientasi pembangunan di bidang pangan yang meliputi lima aspek, yaitu: (1) dari orientasi swasembada beras menjadi swasembada pangan; (2) dari orientasi pemenuhan kuantitas menjadi orientasi yang semakin menekankan kepada kualitas pangan; (3) dari orientasi produksi yang menekankan kepada upaya mencukupi melalui peningkatan produksi, menjadi orientasi untuk menghasilkan/memproduksi pangan yang sesuai dengan permintaan pasar; (4) dari orientasi yang menitikberatkan kepada "komoditas tunggal" (*single commodity*) menjadi orientasi kepada pangan yang beraneka ragam; dan (5) Orientasi yang berupaya untuk mengatasi situasi yang berlebih melalui mekanisme pasar (dari orientasi protektif kepada orientasi mekanisme pasar).

Selain usaha-usaha diatas, pemerintah juga menerapkan program kebijaksanaan cadangan pangan dan perdagangan pangan melalui kebijakan harga pangan. Stabilitas harga pangan telah mampu memacu adopsi teknologi maju, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, serta konsumsi pangan dan perbaikan gizi masyarakat terus mengalami peningkatan secara konsisten (Suryana dan Budianto, 1998:147).

Dengan tingkat produksi yang telah dicapai dan kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah, data Tahun 2008 menunjukkan ketersediaan energi rata-rata penduduk Indonesia mencapai 3.056 kilokalori/kapita/hari dan Angka Ketersediaan Protein sebanyak 81,20 gram/kapita/hari. Hal ini berarti melampaui kecukupan ketersediaan energi berdasarkan Pola Pangan Harapan sebanyak 2200 kilokalori/orang/hari dan Angka Kecukupan Protein sebanyak 55 gram/orang/hari (LIPI, 2004). Secara umum konsumsi energi rata-rata semakin menekati kebutuhan sebesar 2000 kkal/kap/hari, dan pada tahun 2007 bahkan telah memenuhi angka kecukupan dengan rata-rata konsumsi energi

sebesar 2015 kkal/kap atau 100.7% dari angka kecukupan energi. Pada Tahun 2007, konsumsi energi di wilayah pedesaan 2067 kkal/kap/hari (103.3% AKE), sementara di kota 1996 kkal/kap/hr (99.8 % AKE). Akan halnya protein, konsumsi protein sebesar 57,49 gr/kapita/hari, telah melebihi angka anjuran sebesar 52 gr/kapita/hari.

Walaupun persediaan pangan Indonesia telah berada di atas kecukupan energi yang dianjurkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun gambaran rata-rata nasional tidak dapat dipergunakan sebagai petunjuk akan ada-tidaknya masalah pangan dan gizi dalam masyarakat, karena angka rata-rata itu hanya menerangkan potensi nyata persediaan pangan, tetapi tidak dapat menerangkan bagaimana pemerataan ketersediaan dan keanekaragaman pangan baik antar daerah dan antar golongan masyarakat maupun antar keluarga termasuk antar anggota dalam keluarga.

Walaupun persediaan pangan Indonesia telah berada di atas kecukupan energi yang dianjurkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun gambaran rata-rata nasional tidak dapat dipergunakan sebagai petunjuk akan ada-tidaknya masalah pangan dan gizi dalam masyarakat, karena angka rata-rata itu hanya menerangkan potensi nyata persediaan pangan, tetapi tidak dapat menerangkan bagaimana pemerataan ketersediaan dan keanekaragaman pangan baik antar daerah dan antar golongan masyarakat maupun antar keluarga termasuk antar anggota dalam keluarga.

Disparitas ketersediaan dan keanekaragaman konsumsi pangan antara lain disebabkan oleh beberapa faktor: (1) kondisi wilayah atau kondisi ekosistem, dimana faktor ini mencirikan jenis bahan pangan yang tersedia secara lokal; (2) faktor sosial budaya, seperti kebiasaan makan, pengetahuan gizi dan faktor lainnya; (3) dukungan sarana pendukung (misalnya sarana transportasi) untuk menjamin kelancaran pendistribusian bahan pangan; (4) kesenjangan kemampuan dalam memperoleh bahan pangan sebagai akibat dari perbedaan daya beli kelompok masyarakat.

Permasalahan ketahanan pangan/terdapatnya daerah rawan pangan di Indonesia dapat diketahui dari Peta Keamanan dan Ke-

rentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas, FSVA*) yang diterbitkan oleh *World Food Programme* (WFP) bekerja sama dengan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Nasional pada tahun 2009. Pada tahun 2009 terdapat 100 kabupaten yang masih dalam kategori rawan pangan. Hal ini terasa janggal mengingat Indonesia memiliki potensi yang luar biasa secara geografis dan juga sudah dimasukkannya ketahanan pangan dalam alokasi anggaran negara. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut.

Jumlah rumahtangga rawan pangan di pedesaan lebih tinggi dari pada di perkotaan. Penyebab utamanya adalah: (a) daya beli yang rendah atau kemiskinan, (b) perilaku konsumsi, (c) ketersediaan pangan serta cadangan pangan yang tidak memadai dan tidak merata antar wilayah dan antar musim, dan (d) kebijakan makro yang bias di daerah dan masyarakat non-pertanian (Prosiding Diskusi Pakar, 2000).

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005–2025 bahwa Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal

Di Sulawesi Selatan, dengan berbagai kebijakan peningkatan produksi pangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, telah berhasil meningkatkan produksi berbagai jenis tanaman pangan. Bahkan daerah ini memiliki surplus beras rata-rata 1,5 juta ton per tahun. Hal ini telah berhasil mengangkat posisi Sulawesi Selatan sebagai Daerah Penyedia Stok Pangan Nasional.

Mengingat konsep ketahanan pangan menyangkut tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, maka tantangan dalam penerapan konsep ketahanan pangan adalah kenyataan bahwa banyak rumahtangga yang masih

rawan pangan. Dengan demikian, walaupun ketersediaan pangan cukup, tidak berarti bahwa di Sulawesi Selatan dan provinsi lain di Indonesia ini tidak terdapat masalah ketahanan pangan, terutama bagi golongan tertentu (buruh tani, buruh harian, keluarga miskin).

Struktur Wilayah Indonesia merupakan kepulauan dengan berbagai sistem ekologi lingkungan biofisik) dan beragam lingkungan sosial budaya. Dengan sistem ekologi dan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya pun berbeda di wilayah satu dengan yang lain. Karena itu, kebijaksanaan dan intervensi pangan dan gizi harus juga ditentukan per wilayah sesuai dengan sistem ekologi (Suharjo, 1989:126). Hal senada dinyatakan Sumarwoto (1994:250) bahwa kebijaksanaan pangan harus berdasarkan wilayah ekologi dan memanfaatkan keanekaragaman sumberdaya regional. Pengembangan pangan yang sesuai kemampuan ekologi akan lebih mudah dan murah. Selain itu, karena beragamnya ekosistem dan sosial ekonomi wilayah Indonesia, maka dengan pendekatan regional yang berdasarkan kondisi agroekosistem akan lebih efisien dalam penyusunan program pangan (Manwan dan Oka, 1994:335).

Agroekosistem dapat dipandang sebagai suatu bentukan ekosistem yang secara khas bersifat insani. Manusia sebagai salah satu jenis mahluk hidup yang tidak hanya sekedar merupakan bagian dari suatu ekosistem tertentu, tetapi ia juga bertindak secara sadar mengubah dan membentuk ekosistem yang bersangkutan sesuai dengan keinginan dan keperluannya. Hal ini terjadi pada saat manusia memasuki 'fase bertani'. (Suryana, 1985:3). Agroekosistem pada dasarnya mempunyai 4 komponen agroekosistem yaitu: (1) ekosistem; (2) Sosial; (3) ekonomi; dan (4) teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disederhanakan bahwa secara intuitif, "terjadi masalah ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga" dengan mempertimbangkan bahwa 1) walaupun secara nasional, kecukupan energi dan protein terpenuhi, tetapi di tingkat rumahtangga masih menjadi pertanyaan dengan melihat laju perkembangan penduduk miskin; dan 2) ketersediaan pangan dan bahkan mungkin kecukupan pangan rumahtangga berbeda berdasarkan tipe agroekosistem.

Untuk itu, dipandang perlu mengkaji lebih jauh ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga pada tiga tipe agroekosistem dengan pendekatan "sistem sosial". Dengan berbasis pada pemahaman tentang ketahanan pangan rumahtangga pada masing-masing tipe agroekosistem (sawah, lahan kering dan pantai & pulau-pulau kecil) di Sulawesi Selatan diharapkan dapat ditemukan strategi ketahanan pangan rumahtangga.

## 1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas selanjutnya diturunkan rangkaian masalah sebagai berikut:

- 1.1.1. Banyak rumahtangga (*household*) yang mengalami "ketidak-tahanan pangan" (*food insecurity*) yang nampaknya bervariasi antar tipe agroekosistem. Dipertanyakan: (a) bagaimana ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga; (b) adakah hubungan antara karakteristik agroekosistem dengan ketahanan pangan rumahtangga dan (c) mekanisme survival (*coping mekanism*) apa yang dikembangkan oleh rumahtangga dalam upaya memenuhi kebutuhan pangannya.
- 1.1.2. Ketahanan pangan rumahtangga berkaitan dengan produksi (padi), ketersediaan pangan dan pendapatan petani serta faktor-faktor sosial budaya lainnya. Dipertanyakan: (a) adakah pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap ketahanan pangan rumahtangga dan (b) faktor apa saja yang dominan berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumahtangga.
- 1.1.3. Rumahtangga sebagai sistem sosial, di dalamnya terdapat sejumlah orang yang menjadi anggotanya yang memainkan peranan masing-masing. Dipertanyakan, bagaimana anggota-anggota rumahtangga memainkan peranan dalam kaitannya dengan ketahanan pangan rumahtangga.
- 1.1.4. Konsumsi pangan rumahtangga dan status gizi yang menjadi indikator ketahanan pangan rumahtangga, ternyata belum memenuhi harapan, dimana konsumsi pangan relatif masih rendah dengan status gizi yang kurang bahkan buruk terutama pada anak balita. Dipertanyakan, bagaimana hubungan antara tingkat

ketahanan pangan rumahtangga dengan konsumsi pangan rumahtangga dan status gizi anak batita.

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam ketahanan pangan rumahtangga pada tipe agroekosistem sawah, lahan kering dan pantai & pulau-pulau kecil.

Adapun tujuan khusus dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal berikut ini:

- a. Tingkat ketahanan pangan rumahtangga pada tipe agroekosistem sawah, lahan kering dan pantai-kepulauan.
- b. Tingkat produksi pangan, tingkat pendapatan rumahtangga, tingkat ketersediaan pangan (pangan pokok) dan faktor sosial budaya sebagai komponen utama ketahanan pangan.
- c. Peranan anggota rumahtangga terhadap ketahanan pangan rumahtangga pada masing-masing tipe agroekosistem.
- d. Hubungan antara ketahanan pangan rumahtangga dengan konsumsi pangan rumahtangga dan status gizi anak pada masing-masing tipe agroekosistem.
- e. Mekanisme survival yang dikembangkan oleh rumahtangga pada masing-masing tipe agroekosistem dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berimplikasi sebagai berikut:

- (1) Segi keilmuan, sebagai khasanah yang dapat memperkaya kajian sosiologi di bidang pangan, khususnya pendekatan " *Sistem Sosial* " pada tingkat rumahtangga.
- (2) Segi terapan, dari hasil penelitian berupa pemahaman tentang kondisi ketahanan pangan tingkat rumahtangga pada 3 tipe agroekosistem dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menangani masalah-masalah pangan yang berbasis pada karakteristik fisik dan ekonomi-sosial-budaya masing-masing tipe agroekosistem.



## TEORI-TEORI DALAM MEMAHAMI KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA



### 2.1. Konsep Ketahanan Pangan

Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia 1996 di Roma telah meletakkan dasar baru bagi pembangunan pangan yang tidak hanya terbatas pada produksi pangan tetapi yang lebih penting adalah ketahanan pangan bagi penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan sebagai hak yang paling azasi bagi manusia (Hasan, 1998:22).

Istilah ketahanan pangan (*food security*) mulai muncul pada tahun 1970-an ketika terjadi krisis ketersediaan sereal di pasar internasional. Sejak saat itu kajian tentang ketahanan pangan mulai diperbincangkan dalam berbagai forum dan wacana, mulai dari tingkat nasional, regional sampai tingkat internasional.

Setelah krisis pangan ini mulai reda, pada tahun 1980-an terjadi pergeseran konsep ketahanan pangan dari unit nasional ke unit yang lebih kecil, yaitu daerah dan rumahtangga. Dengan demikian fokusnya tidak hanya pada penyediaan pangan di tingkat wilayah, tetapi juga pada penyediaan dan konsumsi pangan (jumlah dan mutu) di tingkat daerah dan rumahtangga bahkan individu untuk memenuhi kebutuhan gizi (Braun, et al , 1992 dalam Hardinsyah, dkk, 1998:4)

Oleh berbagai lembaga internasional seperti FAO, ketahanan pangan dipakai sebagai titik tolak evaluasi keadaan pangan dunia,

yang dilatarbelakangi oleh pemikiran yang muncul dalam Konperensi Pangan Dunia pada tahun 1974. Konsep ketahanan pangan kemudian mempengaruhi berkembangnya konsep swasembada atau *self sufficiency* yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik melalui produksi dalam negeri. Konsep swasembada akhir-akhir ini sering dinilai menjurus ke arah autarki (*economic self-sufficiency*) dan sampai pada tahap tertentu mengabaikan prinsip-prinsip efisiensi dan keunggulan komparatif (Soetrisno, 1998:190).

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sidang komite Ketahanan Pangan FAO tahun 1991, ketahanan pangan diberikan pengertian sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam pengertian ini ketahanan pangan dikaitkan dengan tiga faktor utama yaitu: (a) kecukupan (ketersediaan) pangan, (b) stabilitas ekonomi pangan, dan (c) akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan. (FAO, 1997; Tabor, et al, 1999:1; dan Soetrisno, 1996:4). Untuk itu, pemerintah menetapkan program stabilisasi harga komoditi, jika harga pasar bebas tidak memberi jaminan stabilitas harga (Timmer 1993:6).

World Declaration and Plan of Action for Nutrition (FAO/WHO, 1992) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah-tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat (FAO, 1996). Salah satu rekomendasi penting dari konperensi tersebut adalah komite ketahanan pangan dunia ditugasi untuk memantau status gizi masyarakat di negara anggota dan situasi ketahanan pangan untuk dilaporkan dalam sidang tahun 1994. Perkembangan ini sangat berpengaruh terhadap konsepsi ketahanan pangan yang dianut oleh FAO, sebagaimana terlihat dari mulai dimasukkannya aspek gizi yakni kecukupan jumlah, mutu dan keragaman serta keamanannya bagi kehidupan yang sehat (Soetrisno, 1998: 191). Kemudian dalam sidang World Food Summit 1995, defenisi ini diperluas dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat (Hardinsyah, dkk, 1998:4).

Pada KTT Pangan Dunia 1996 di Roma ditegaskan kembali tentang Ketahanan Pangan yakni hak setiap orang untuk memiliki akses terhadap pangan yang aman, bermutu dan bergizi, konsisten dengan hak untuk memperoleh pangan yang cukup dan hak azasi bagi setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Kelaparan adalah bentuk kekurangan pangan, yang apabila berlangsung lama dapat mengakibatkan kurang gizi (FAO, 1996).

Konsep baru tentang ketahanan pangan yang dikaitkan dengan ketersediaan, akses individu serta aspek gizi dan keamanan pangan juga diikuti orientasi baru bagi arah kebijaksanaan pangan nasional di masing-masing negara anggota yang harus didasarkan pada konsep kemandirian atau *self reliance* (Soetrisno, 1998: 190).

Sehubungan dengan perkembangan pengertian ketahanan pangan tersebut, dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 (Kantor Menteri Negara Urusan Pangan, 1996) defenisi ketahanan pangan sebagai berikut:

*“ Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau “.*

Dengan demikian, ketahanan pangan secara umum diartikan sebagai adanya jaminan bahwa setiap penduduk (siapa saja) di suatu negara selalu (dimana saja, kapan saja), tercukupi kebutuhan pangan dan gizinya sebagai syarat utama untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan (Soekirman, 1996:2).

Dengan pengertian tersebut, maka berbicara soal ketahanan pangan, pada dasarnya kita bicara soal berbagai hal yang dapat menyebabkan orang tidak tercukupi kebutuhan pangannya.

Hal-hal tersebut antara lain adalah tersedianya pangan, lapangan kerja, dan pendapatan (Soekirman, 1996:3, FAO, 1996; Lobao dan Thomas, 1992: 15-17; dan Gittinger, et al, 1987:2-3). Ketiga hal tersebut menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki ketahanan pangan, artinya dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi setiap anggota keluarga atau tidak. Cukup tidaknya persediaan pangan di pasar

berpengaruh pada harga pangan. Bagi keluarga yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tidak cukup, kenaikan harga pangan terutama bahan pangan pokok seperti beras, dapat mengancam kebutuhan gizinya. Berarti ketahanan pangan keluarganya terancam. Sebaliknya, persediaan cukup, harga stabil, tetapi banyak penduduk tanpa kerja dan tanpa pendapatan, berarti tanpa daya beli, juga menyebabkan persediaan pangan itu tidak efektif. Banyak rakyat yang dalam ancaman ketahanan pangannya. Karena itu suatu pembangunan yang berorientasi kepada rakyat (pembangunan SDM) akan mengatur keseimbangan dan keserasian antara kebijaksanaan sistem pangan (produksi, distribusi, pemasaran dan konsumsi) dan kebijaksanaan di bidang sosial seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, gizi dan lain-lain.

Menurut Susanto (1996: 6-7) ketahanan pangan rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan dan kemampuan daya beli, tetapi juga beberapa hal yang berkaitan dengan aspek sosial budaya. Selanjutnya Sutrisno (1998) mengemukakan bahwa masalah-masalah dalam ketahanan pangan meliputi: kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang sehat; sulitnya mempertahankan secara konsisten kebijaksanaan swasembada yang telah ditetapkan, tingkat konsumsi yang masih rendah (jumlah, mutu, serta kurang beragam), tingkat pendapatan yang masih rendah, dan masalah yang berkaitan dengan distribusi pangan yang belum merata antar daerah dan rumah tangga yang saat ini masih berpusat pada ibukota propinsi dan kota kabupaten dan belum menjangkau daerah-daerah.

Menurut Gittinger, et al (1987: 3-7) dan Hidayat (1997:9) bahwa terdapat dua jenis ketidaktahanan pangan yaitu yang bersifat kronis (*chronic food insecurity*) dan yang bersifat sementara (*transitory food insecurity*). Ketidaktahanan pangan jenis pertama (kronis) terjadi dan berlangsung secara terus menerus yang biasanya disebabkan oleh rendahnya daya beli atau kemampuan memproduksi sendiri sehingga sering terjadi di daerah terisolir dan gersang. Sedang ketidaktahanan pangan jenis kedua (sementara) terjadi secara mendadak karena ketidakmampuan harga pangan dan produksi pangan atau pendapatan

keluarga sehingga pada suatu saat tertentu sekelompok orang, keluarga atau masyarakat tidak mempunyai cukup pangan untuk dikonsumsi.

Usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat rumahtangga dapat ditempuh melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi distribusi pangan, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kemampuan penyediaan pangan, peningkatan pembentukan cadangan pangan, dan peningkatan pengetahuan pangan dan gizi (Soeharjo, 1996: 7-8; Soetrisno, 1996:6; dan Konandreas, et al, 199:17-19). Senada dengan pendapat T.R. Frankenberger dan M.K. McCaston (1992:32) yang menyatakan bahwa keberlanjutan ketahanan pangan rumahtangga dapat dicapai melalui upaya-upaya: peningkatan produksi, adanya alternatif kegiatan dalam meningkatkan pendapatan, peningkatan kapasitas cadangan pangan, strategi ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Menurut Suryana, 1996 (dalam Kasryno, 1997:83), ketahanan pangan mencakup kemampuan untuk menyediakan pangan dalam ragam, kualitas dan jumlah yang cukup sepanjang tahun melalui peningkatan produksi dalam negeri atau impor dan mendistribusikannya secara efisien dan merata dengan tingkat harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat luas dalam rangka mendukung pertumbuhan konsumsi pangan dan gizi yang wajar untuk dapat hidup dan tumbuh secara sehat dan produktif. Sedikinya ada empat aspek penting yaitu: (a) ketersediaan pasokan; (b) pendistribusian pangan; (c) aksesibilitas masyarakat luas (daya beli); dan (d) pilihan ragam komoditas oleh rumahtangga. Pada aspek dua pertama, peranan dalam strategi ketahanan pangan nasional dapat menonjol, namun pada aspek terakhir yaitu pilihan ragam komoditas oleh masyarakat bukan saja ditentukan oleh daya beli, tetapi juga oleh tingkat pendidikan, pengetahuan tentang pangan dan gizi, serta faktor sosial budaya lainnya. Aspek sosial budaya yang dimaksud sebagaimana dinyatakan oleh Endang L.H. (1995:3) adalah pilihan dan selera makan, kepercayaan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, pendirian dan sikap terhadap makanan dalam hubungannya dengan kesehatan dan peranan ritual.

Dalam hubungannya dengan aspek sosial budaya, Menurut Melati, dkk (1994) di Sulawesi Selatan menemukan berbagai macam kegiatan sosial budaya yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi ketersediaan dan keanekaragaman pangan seperti perayaan maulid, barasanji, syukuran kelahiran anak (aqiqah), khitanan anak, khataman Qur'an, pesta perkawinan, pesta kematian (Tongkonan di Tana Toraja), dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan seremonial tersebut sudah melembaga pada masyarakat di Sulawesi Selatan.

## 2.2. Ketahanan Pangan di Tingkat Rumah tangga dan Indikatornya

Berdasarkan atas kemajuan dan tantangan yang dicapai selama 25 tahun pembangunan tahap pertama, maka sasaran dan kebijaksanaan pangan dalam PJP II adalah: (1) Terwujudnya ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga yang direfleksikan oleh ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang cukup tinggi; (2) Terwujudnya diversifikasi pangan dalam bentuk ketersediaan berbagai komoditas pangan dan pangan olahan; (3) Terjaminnya keamanan pangan yang dicirikan oleh bebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya terhadap kesehatan dan tidak sesuai dengan keyakinan mereka; dan (4) Perlunya dukungan aspek kelembagaan pangan dalam bentuk peningkatan pelayanan dan koordinasi penyediaan pangan, kebijaksanaan harga dan distribusi pangan, serta sistem pengembangan industri pangan.

Sejalan dengan sasaran dan kebijaksanaan pangan PJP II tersebut, pada rumusan GBHN Tahun 1999-2003, dua fokus kebijakan pembangunan pertanian yaitu: (1) mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman sumberdaya bahan pangan, serta kelembagaan dan budaya lokal, dan (2) mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetensi dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumberdaya manusia daerah bersangkutan.

Dalam perspektif pembangunan pangan yang luas, maka peningkatan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga memiliki beberapa segi yang sangat mendasar yaitu (a) akses pangan dan

gizi yang seimbang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pangan merupakan hak yang paling azasi bagi manusia; (b) keberhasilan dalam proses pembentukan sumberdaya manusia berkualitas secara biologis terletak pada keberhasilan memenuhi kecukupan pangan dan perbaikan pola konsumsi; (c) ketahanan pangan merupakan unsur strategis dalam pembangunan nasional karena tidak hanya mempunyai arti biologis, tetapi mempunyai arti penting dalam ketahanan ekonomi dan politik; dan (d) mengatasi masalah ketahanan pangan bukan hanya masalah produksi atau pertanian, sehingga penanganannya memerlukan kebijakan serta langkah terpadu dan kompak serta berintegrasi dengan perkembangan global.

Berdasarkan pada perspektif pembangunan pangan tersebut upaya untuk mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi, strategi kebijaksanaan pengembangan sistem ketahanan pangan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang makin terjangkau secara ekonomis pada tingkat rumahtangga, dan makin beragam sesuai dengan pola konsumsi pangan gizi seimbang. Strategi kebijakan yang mencakup kebijakan penganekaragaman pangan dan kebijakan peningkatan ketersediaan pangan yang bertumpu pada penyempurnaan aspek kelembagaan pangan dalam arti luas dan peningkatan kapasitas para pelaku.

Nampak bahwa sasaran dan kebijaksanaan utama dalam bidang pangan (dalam rumusan GBHN 1999-2004) adalah terwujudnya ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga (KPRT), dengan tetap menjaga momentum ketahanan pangan pada tingkat makro yang dinilai telah berjalan cukup baik.

Menurut Hidayat (1997:9) bahwa ketahanan pangan harus dicapai pada tingkat keluarga (*household food security*) sehingga kebutuhan pangan untuk setiap anggota keluarga dapat terpenuhi setiap saat. Jika ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga sudah tercapai maka dapat dipastikan bahwa ketahanan pangan pada tingkat daerah dan tingkat nasional tercapai. Tetapi keadaan sebaliknya tidak selalu berlaku, jika ketahanan pangan pada tingkat nasional atau regional telah tercapai belum tentu ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga

tercapai. Hal ini dapat disebabkan terutama karena harga pangan tidak terjangkau masyarakat dan sistem distribusi pangan yang kurang sempurna.

Hasil rumusan Internasional Congress of Nutrition (ICN) yang diselenggarakan di Roma tahun 1992 mendefinisikan ketahanan pangan rumahtangga adalah sebagai berikut (*Suharjo, 1996:3*):

*"Ketahanan pangan rumahtangga (household food security) adalah kemampuan rumahtangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dalam jumlah, mutu, dan ragam yang seimbang dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara produktif"*

Kecukupan pangan disini mencakup segi kuantitas dan kualitas. Agar rumahtangga dapat memenuhi kecukupan pangan tersebut berarti rumahtangga harus memiliki akses memperoleh pangan baik dari produksi sendiri maupun membeli dari pasar.

Dengan demikian bahwa rumahtangga selain sebagai unit sumberdaya (fisik, manusia, keuangan/teknologi), rumahtangga juga berposisi sebagai unit aktivitas. Dalam kaitan ini, terdapat tiga jenis aktivitas pada setiap rumahtangga yakni aktivitas produksi, konsumsi dan manajemen. Aktivitas produksi ditujukan pada pemanfaatan sumberdaya yang dikuasai untuk tujuan-tujuan produksi. Aktivitas konsumsi berkaitan dengan semua kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumahtangga, mencakup konsumsi pangan, sandang, papan, pendidikan dan lain sebagainya. Aktivitas manajemen berhubungan dengan hak pemanfaatan sumberdaya fisik, pembagian tugas dan peranan di antara anggota rumahtangga, dan alokasi pemanfaatan sumber-sumber keuangan (Ohama, 2000).

Berdasarkan hasil Lokakarya Ketahanan Pangan Nasional (Departemen Pertanian, 1996) ketahanan pangan rumahtangga didefinisikan dalam beberapa alternatif rumusan, yaitu: (1) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumahtangga dalam jumlah, mutu dan ragam sesuai budaya setempat dari waktu ke waktu agar hidup sehat; (2) kemampuan rumahtangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari produksi sendiri, dan atau membeli dari waktu

ke waktu agar dapat hidup sehat; (3) kemampuan rumahtangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat.

Ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga dipengaruhi oleh ketahanan pangan pada tingkat regional, nasional dan global. Ketahanan pangan di tingkat rumahtangga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti luas tanam, luas panen, produktivitas, benih, pupuk, pestisida, alat pertanian, tenaga kerja dan sebagainya. Sementara untuk rumahtangga bukan petani, dalam memperoleh pangan di pasar akan dipengaruhi oleh kemampuan daya beli (Gujral dan Ira, 1988: 1-2; D.S. Tyagi dan Vijay S.V. 1988: 6-7). Kedua faktor tersebut di atas belum menjamin terpenuhinya konsumsi pangan yang memenuhi persyaratan gizi dan kesehatan. Oleh karena itu untuk mewujudkan ketahanan pangan perlu diperhatikan faktor lain, yaitu pengetahuan gizi (Suharjo, 1996 dalam Hardinsyah, 1998:5).

Ada 3 tingkatan ketahanan pangan yaitu tingkat internasional, tingkat nasional dan tingkat rumahtangga. Ketahanan pangan tingkat internasional merupakan jumlah produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dunia yang terus meningkat sehingga dapat bergerak bebas antar negara pada tingkat harga yang stabil dan terjangkau sehingga dimungkinkan untuk mencukupi produksi domestik melalui impor (Konandreas, et al, 1991:18). Di samping itu ketahanan pangan tingkat internasional juga untuk menanggulangi gangguan produksi yang tidak diharapkan dan untuk menstabilkan harga. Ketahanan pangan tingkat nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk memenuhi target konsumsinya sepanjang waktu. Dalam hal konsep swasembada pangan sangat penting. Ketahanan pangan tingkat rumahtangga adalah kemampuan suatu rumahtangga memenuhi kebutuhan konsumsinya sepanjang waktu. Sebagaimana ketahanan pangan tingkat nasional ketahanan pangan tingkat rumahtangga dapat dicapai melalui daya beli dan produksi masyarakat. Ini berarti bahwa kebutuhan pangan rumahtangga dapat dipenuhi baik dari pendapatan yang cukup atau dari sumberdaya-sumberdaya lain atau keduanya (Azis, 1990 dalam Pangan 1996;, Gujral dan Ira, 1988:1-5).

Pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan terhadap kualitas makanan masyarakat. Engel's (dalam Suharjo, 1989), telah melakukan penelitian secara empiris mengenai perubahan pendapatan terhadap pola konsumsi rumahtangga menemukan bahwa jika pendapatan meningkat, proporsi pengeluaran untuk makanan menurun, tetapi pengeluaran absolut meningkat. Perubahan pendapatan ini pengaruhnya tidaklah sama untuk tiap masyarakat. Ditemukan pula kenyataan bahwa faktor individu, makanan dan lingkungan merupakan berbagai macam faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan seseorang.

Timmer dkk (dalam Thaha, 1995: 75-77) mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan pengeluaran untuk makanan:

(1). Teori *Consumer Choice*

Teori ini mengatakan bahwa kelompok yang berpendapatan cukup akan menyediakan dana yang cukup dan seimbang untuk belanja pangan dan non pangan, tetapi pergeseran tersebut akan tetap berada pada batas-batas keseimbangan kebutuhan pangan dan non pangan. Akan tetapi, pola ini tidak terjadi pada kelompok miskin.

(2). Teori *Budget Constrain*

Teori ini mengatakan bahwa ketika menentukan biaya untuk berbelanja pangan dan nonpangan kelompok miskin akan diperhadapkan dengan dua kendala yakni: pertama, berapa total pendapatan yang akan dibelanjakan; dan kedua, harga relatif dari komoditas yang akan dibeli. Dengan pendapatan yang sangat terbatas, peningkatan pendapatan akan meningkatkan pula belanja untuk pangan. Akan terjadi sebaliknya bila pendapatan kelompok miskin menurun. Dilain pihak bila harga pangan relatif naik, maka daya beli akan menurun. Dengan demikian, jumlah pangan yang dibeli akan menurun kuantitas dan kualitasnya.

(3). Teori Elastisitas Permintaan Terhadap Makanan

Meningkatnya variasi makanan yang dibeli selalu bersamaan dengan meningkatnya pendapatan. Diet dengan karbohidrat

tinggi dan protein rendah akan lebih bervariasi ketika pendapatan meningkatkan daya beli untuk membeli buah, sayur, sayur, dan sumber hewani yang lebih mahal. Perbedaan produk yang dibeli berdasarkan tingkat pendapatan dalam terminologi ekonomi disebut sebagai elastisitas permintaan.

(4). Teori Elastisitas Pendapatan Terhadap Makanan

Elastisitas pendapatan menunjukkan prosentase perubahan permintaan jika pendapatan berubah 1% (Caliendo 1979 dalam Thaha, 1995). Elastisitas pendapatan untuk sebagian besar makanan adalah lebih besar daripada nol. Artinya konsumsi meningkat bila pendapatan meningkat. Ada beberapa jenis makanan yang harus tetap dibeli walaupun pendapatan rendah, artinya permintaan makanan ini tidak elastis.

Pakpahan, dkk (1992:2-3), mengemukakan bahwa kemampuan rumahtangga mengendalikan kebutuhan pangannya, menunjukkan ketahanan pangan rumahtangga yang bersangkutan. Hal ini tergantung dari kemampuan rumahtangga menghasilkan pangan produksi sendiri dan kemampuan membeli pangan di pasar. Pada masyarakat berpendapatan rendah pada umumnya memperoleh pangan bukan dari hasil produksi sendiri melainkan dari hasil membeli di pasar. Oleh karena itu kemampuan membeli pangan inilah merupakan sumber ketahanan pangan rumahtangga. Kemampuan membeli pangan sebuah rumahtangga pada sistem pasar ditentukan oleh daya beli yang direfleksikan oleh tingkat pendapatan rumahtangga. Pendapatan rumahtangga biasanya didekati dari tingkat pengeluaran, karena pengukuran dari segi pendapatan cenderung lebih sulit dilakukan.

Ketahanan pangan merupakan konsep yang multidimensioanl, yaitu berkaitan antar mata rantai sistem pangan dan gizi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi dan status gizi. Oleh karena itu indikator ketahanan pangan rumahtangga dapat dicerminkan dari tingkat kerusakan tanaman, tingkat produksi, ketersediaan pangan pengeluaran pangan, fluktuasi harga, jumlah dan mutu konsumsi pangan serta status gizi (Suharjo. 1996:6).

Hidayat (1997:8) mengemukakan bahwa ditinjau dari faktor-faktor atau komponen yang berperan, sistem ini terdiri dari komponen sumberdaya alam hayati, sumberdaya teknologi, sumberdaya manusia dan kelembagaan. Semua komponen tersebut berikut faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat satu sama lain berkaitan dan saling mempengaruhi pada setiap sub-sistem dalam menentukan keragaan dan dinamika sistem secara keseluruhan.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Garcia (dalam Sayogyo, 1989:5) bahwa sistem pangan terdiri dari subsistem fisik, sub sistem produksi usahatani, dan subsistem sosial ekonomi. Sementara itu Soetrisno (1996) mengemukakan ukuran ketahanan pangan rumah tangga dapat dilihat dari kecukupan konsumsi maupun ketersediaan pangan yang sesuai dengan norma gizi. Sedangkan indikator sosial dan demografi dapat digunakan untuk mengetahui resiko ketahanan pangan seperti pendapatan, pendidikan, struktur keluarga, harga pangan, pengeluaran pangan dan sebagainya.

Dalam studi yang dilakukan oleh Sumarwan dan Sukandar (1998 : 32), pengertian ketahanan pangan keluarga didefinisikan sebagai tingkat konsumsi energi dan protein dari keluarga. Konsumsi pangan merupakan gambaran dari aspek ketersediaan dan kemampuan keluarga tersebut untuk membeli dan memperoleh pangan. Dengan demikian konsumsi pangan merupakan variabel yang mudah digunakan sebagai indikator ketahanan pangan keluarga yang sejalan dengan konsep ketahanan pangan FAO.

Ketahanan pangan rumah tangga erat berkaitan dengan sikap dan perilaku anggota-anggota rumah tangga bersangkutan terhadap pangan. Dengan sikap dan perilaku yang spesifik, maka rumah tangga tertentu melakukan tindakan untuk mendapatkan pangan sehari-hari.

Dari studi-studi yang dilakukan oleh Joko Susanto dan Parsudi Suparlan 1989, tentang kebiasaan pangan (*food habits*) di berbagai daerah dimana masyarakat mempunyai 'kebiasaan pangan' yang berbeda antar daerah, ditemukan antara lain adanya faktor-faktor tertentu yang mendasari rumah tangga memilih makanan sehari-hari, khususnya yang tergolong makanan pokok. Di antara faktor-faktor

tersebut yang banyak disebutkan oleh responden di berbagai lokasi studi adalah bahwa makanan itu: enak, mengenyangkan, menguatkan, tidak membosankan, murah/mudah didapat, mudah diolah dan berharga (Susanto, 1996).

Wenkam (dalam Suharjo, 1989) menemukan sebuah model mengenai berbagai macam faktor yang berpengaruh terhadap kebiasaan makan, yaitu faktor ketersediaan fisik dan budaya yang meliputi produksi, pengawetan, distribusi, persiapan, peralatan, status sosial, peranan sosial/upacara, etika dan pembagian tugas.

Hill 1981 (dalam Susanto, 1996) mengemukakan pula adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan seseorang, pranata atau norma sosial yang ia anut dan pengetahuannya tentang konsekuensi perilaku (positif atau negatif). Ketiga hal itu dilandasi oleh sikap (*Attitude*). Sementara itu 'sikap' pada diri seseorang dipengaruhi oleh 'nilai-nilai kepercayaan' (*belief systems*) dan 'kebutuhan-kebutuhannya'. Semua unsur tersebut pada gilirannya bermuara pada perilaku seseorang terhadap makanannya.

Selanjutnya Krondl dan Lau, 1985 (dalam Susanto, 1996) mengemukakan berbagai faktor yang mempengaruhi cara-cara seseorang memilih makanannya yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yakni: (a) Faktor Endogen, meliputi: keturunan, jenis kelamin, umur, kegiatan; (b) Faktor Eksogen, meliputi: sosial-budaya, ciri masyarakat dan sistem ekonomi; dan (c) Persepsi/Wawasan, meliputi: pengetahuan, kepercayaan, menyenangkan, harga, prestige, dikenal, rasa/selera, toleran.

Menurut Hasan (1995:5) ketahanan pangan tingkat rumahtangga dapat diketahui melalui pengumpulan data konsumsi dan ketersediaan pangan dengan cara survei pangan secara langsung. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan norma kecukupan yang telah ditetapkan. Selain pengukuran konsumsi dan ketersediaan pangan melalui survei tersebut dapat pula dikumpulkan data mengenai faktor ekonomi, sosial dan demografi, harga pangan, pengeluaran dan sebagainya. Selanjutnya Atmojo, dkk. (1995 dalam Adi, 1998:9) menyatakan bahwa *cut off point* indikator untuk menentukan tingkat

keterjaminan pangan ditentukan secara teoritis berdasarkan atas norma kecukupan pangan (energi). Menurut Suharjo (1996:6-7) data status gizi keluarga dapat mempertajam pengambilan keputusan apakah rumah tangga mengalami gangguan ketahanan pangan atau tidak?

### 2.3. Rumah tangga Sebagai Sistem Sosial

Sebagai akibat dari perkawinan, terjadi suatu kesatuan sosial yang disebut rumah tangga (*household*). Kesatuan ini mengurus ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan. Suatu rumah tangga sering terdiri dari satu keluarga inti saja, tetapi juga bisa terdiri atas lebih dari satu, misalnya dua sampai tiga keluarga (*extended family*). Pada banyak suku bangsa istilah untuk "rumah tangga" adalah "dapur" (Koentjaraningrat, 1981:104).

Keluarga (*the family*) diartikan sebagai suatu grup kerabat yang paling kecil dalam sistem kekerabatan (*Kinship*) yang menggambarkan kesatuan berdasarkan keanggotaannya melalui perkawinan dan hubungan darah. Hal ini berarti bahwa keluarga terdiri dari orang-orang tertentu sebagai anggotanya dan tertutup bagi orang-orang yang bukan anggota.

Keluarga dapat dipandang atau diperlakukan sebagai sistem sosial oleh bagian lain-lainnya dalam masyarakat dan dalam sistem kekerabatan (Levy, 1971:5). Selanjutnya dikatakan bahwa dalam masyarakat terdapat apa yang dikenal sebagai keluarga inti (*nuclear family*), keluarga prokreasi dan keluarga orientasi, masing-masing terdiri dari dua generasi; serta keluarga "luas" (terdiri dari tiga generasi).

Rumah tangga (*Household*) adalah grup tempat kehidupan keluarga beroperasi, melakukan "*householding*", berdasarkan penggunaan alat, bahasa, masak-memasak (*cookery*) dan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin.

Selain itu, pengertian rumah tangga adalah keluarga luas/sekunder adalah keluarga yang bukan saja terdiri dari suami, istri dan anak, tetapi juga ada orang lain yang tinggal di dalamnya (misalnya: mertua, ipar, sepupu, dsb).

Pengertian yang sangat mendalam mengenai hubungan keluarga bagi hampir semua anggota masyarakat telah diobservasi sepanjang sejarah peradaban manusia. Para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, dan bahwa keanehan-keanehan suatu masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang berlangsung di dalamnya. Karya etika dan moral yang tertua menerangkan bahwa masyarakat kehilangan kekuatannya jika anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggungjawab keluarganya. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa kedudukan utama setiap keluarga adalah fungsi pengantara pada masyarakat besar, sebagai penghubung pribadi dalam struktur sosial yang lebih besar. Suatu masyarakat tidak akan bertahan jika kebutuhan rumahtangga yang bermacam-macam tidak terpenuhi, seperti umpamanya produksi dan pembagian makanan, pengembangan generasi muda dalam kehidupan sosial, dan lain sebagainya (Goode, 1985: 9-11).

Dalam konteks masyarakat dengan sistem perekonomian yang agraris, keluarga (konsepsional) dan rumahtangga (operasional) merupakan unit produksi, konsumsi, reproduksi (dalam hubungannya dengan fertilitas) serta interaksi sosial ekonomi. Dalam hal ini kita tidak cukup hanya memperhatikan bentuk dan fungsi dari rumahtangga saja, melainkan juga perlu mengerti perilaku serta terjadinya rumahtangga itu. Misalnya. Dalam Model Baru Ekonomi Rumahtangga (*The New Household Economic*), model yang dikembangkan berdasarkan atas kesatuan rumahtangga terdiri dari keluarga inti, disebut "*The Nuclear Family Household*". Juga para ahli antropologi sadar bahwa walaupun dalam masyarakat nyatanya ditemukan variasi yang cukup besar mengenai komposisi rumahtangga, namun mereka tetap beranggapan bahwa Keluarga Inti merupakan dasar utama bagi struktur bentuk keluarga lainnya (Pudjiwati Sajogyo, 1982: 7-8).

Dalam hal ini Murdock (1949:389) mengemukakan bahwa Keluarga Inti adalah kesatuan sosial yang memenuhi fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Seksual: memenuhi kebutuhan seksual dan mengatur hubungan tersebut.
- b. Reproduksi: melindungi wanita/istri selama hamil dan menyusui bayinya serta melindungi anak sampai dapat berdiri sendiri.
- c. Pendidikan: suami dan istri meneruskan pola "ajar" yang khususnya diterima dari orang-tuanya berupa nilai, norma, cita-cita dan harapan; maka terjadilah enkulturasi dari pada anak baik laki-laki maupun perempuan. Seluruh proses itu disebut proses sosialisasi.
- d. Ekonomis: dengan adanya pembagian kerja antara anggota-anggotanya, terutama karena perbedaan jenis kelamin, organisasi. Keluarga Inti cukup efisien dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh anggotanya.

Horton dan Hunt (1987:274-279), berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat, keluarga adalah suatu struktur kelembagaan yang berkembang melalui upaya masyarakat untuk menyelesaikan tugas-tugas (fungsi-fungsi) tertentu, yaitu: (a) pengaturan seksual; (b) reproduksi; (c) sosialisasi; (d) afeksi; (e) penentuan status; (f) perlindungan; dan (g) ekonomi.

Dalam menganalisa keluarga atau rumah tangga sebagai sistem sosial yang hidup ada dua dimensi yaitu: pertama adanya saling kaitan bagian-bagian yang merupakan sistem, dan kedua mencakup pertukaran antara keluarga dengan lingkungannya. Misalnya, dalam mengkonseptualisasikan keluarga sebagai sistem dalam hubungannya dengan status suami, istri dan anak, tetapi pembahasannya harus juga menakup bagaimana keluarga itu saling berhubungan dengan sistem sosial parsial lainnya. Dapat pula berbicara tentang sistem sosial yang lebih besar, terdiri dari berbagai bagian institusionalnya, tetapi sistem itu juga adalah sistem-terbuka dengan pengaruh timbal balik dari sistem lain termasuk sistem biologi dan psikologi (Poloma, 1987).

Menurut Parsons (1951) sistem sosial itu adalah tindakan sosial yang diatur dan cenderung mempertahankan keseimbangan sistem tersebut. Dalam menjelaskan konsep sistem sosial ini Parson (dalam Rusidi, 1989) memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- bagaimana keteraturan masyarakat itu dapat terjadi,
- mengapa sistem sosial harus berpegang teguh kepada seperangkat orientasi nilai umum yang terungkap dalam bentuk harapan peranan yang dijalankan oleh pelaku dalam interaksi berpola, dan
- proses-proses apa yang menjamin kelangsungan sistem itu.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Parsons bertolak dari pendapat Weber bahwa masyarakat dapat dipadukan karena adanya *nilai-nilai budaya* yang dibagi bersama dan dilembagakan menjadi norma-norma sosial, serta diinternalisasikan menjadi motivasi-motivasi dari kepribadian (*personality*). Karena itu pula maka keteraturan dan kestabilan sistem itu terjadi karena *kultur* dan *nilai-nilai bersama*. Kultur dan nilai bersama itu meliputi nilai-nilai tujuan bersama, sehingga masalah penyimpangan terhadapnya dianggap mengingkari nilai bersama itu; jadi kultur dan nilai bersama itu merupakan permufakatan (*consensus*) para anggota masyarakat. Tetapi untuk menetapkan pola interaksi yang dapat berlangsung terus-menerus tidak cukup hanya dengan konsensus saja, karena itu Parsons memperluas analisisnya dengan mengembangkan variabel-variabel pola, yang digunakan untuk menggolongkan *orientasi-orientasi pelaku* dalam sistem kepribadian, syarat-syarat normatif dalam sistem sosial, dan *pola-pola nilai* dalam budaya. Pola-pola nilai dalam budaya itu dipandang sebagai subsistem kebudayaan (*Culture*), syarat-syarat normatif dalam sistem sosial dipandang sebagai subsistem sosial, orientasi-orientasi pelaku dipandang sebagai subsistem kepribadian (*personality*), ditambah dengan kemampuan organisme individu yang dipandang sebagai subsistem perilaku organisme.

Keempat subsistem tersebut merupakan prasyarat bagi keteraturan dan keseimbangan sistem sosial. Subsistem kebudayaan merupakan prasyarat bagi fungsi pertahanan pola perilaku (*Latent Pattern Maintenance*), Subsistem Sosial bagi fungsi Integrasi (*Integration*), Subsistem Kepribadian (*Personality*) bagi fungsi pencapaian tujuan (*Goal Attainment*), dan Subsistem Perilaku Organisme berfungsi bagi penyesuaian diri (*Adaptation*). *Latent Pattern Maintenance* menunjuk masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. *Integration*

sesuai dengan isu Durkheimian yaitu koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya fungsional. Masalah pemenuhan tujuan sistem dan penetapan prioritas di antara tujuan-tujuan itu tergantung pada prasyarat *goal attainment*. *Adaptation* menunjuk pada kemampuan sistem menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. Keempat kesamaan tersebut ditemukan di dalam seluruh sistem, apakah itu sistem biologis, sosial, psikologis. Parsons (1970, dalam Poloma, 1985) menegaskan bahwa skema empat fungsi itu tertanam kukuh di dalam setiap dasar sistem yang hidup pada seluruh tingkat organisasi serta tingkat perkembangan evolusioner, mulai dari organisme bersel-satu sampai peradaban manusia yang tertinggi.

Menurut Johnson (1986:128-133) pada tingkat masyarakat, ide *pattern maintenance* menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat. Seperti halnya dengan masalah integrasi, tak satupun struktur institusional yang memenuhi persyaratan *latent pattern maintenance* ini. Institusi religius relevan karena tekanannya pada usaha merumuskan nilai-nilai akhir dan meningkatkan serta memperkuat komitmennya terhadap nilai-nilai itu. Selain itu, institusi keluarga juga relevan, karena sumbangannya terhadap persyaratan fungsional *latent pattern maintenance* itu. Sosialisasi awal bagi anak-anak secara khas terjadi dalam keluarga. Lagi pula, meskipun fungsi ini dibagi bersama sistem sekolah, keluarga terus menjadi penting dalam proses sosialisasi selama masa kanak-kanak dan remaja. Sistem pendidikan merupakan struktur utama lainnya yang menyumbang pada fungsi *pattern maintenance* dengan memberikan sosialisasi bagi "calon baru" dari setiap generasi. Proses sosialisasi sangat penting untuk mempertahankan pola-pola budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keluarga merupakan satu sistem dan karena itu dia memiliki tugas pula untuk melaksanakan fungsi integrasi dimana anggota keluarga atau rumahtangga dapat berfungsi sesuai dengan status dan perannya. Fungsi adaptif menunjuk pada keharusan bagi keluarga untuk menghadapi lingkungannya baik fisik maupun sosial.

Fungsi pencapaian tujuan menunjuk pada tindakan-tindakan keluarga atau rumahtangga untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya.

Kehidupan sosial masyarakat akan berada pada keteraturan jika ada kesesuaian di antara subsistem-subsistem (budaya, sosial, kepribadian dan perilaku organisme) itu dengan masing-masing fungsinya (*Latensi, integrasi, adaptasi, dan pencapaian tujuan*). Jika tidak, maka akan terjadi perubahan sosial dalam sistem itu, yang akan berusaha menuju pada keseimbangan baru.

Subsistem budaya (*Culture*) mempunyai unsur-unsur seperti nilai, kaidah, falsafah, norma atau peraturan-peraturan yang akan dijadikan penilaian dan patokan (pola) tingkah laku individu dalam kelompok (pranata sosial) atau dalam masyarakat (mores atau tata-susila). Seorang anak yang lahir dari salah satu keluarga, sejak lahirnya telah disosialisasikan oleh anggota keluarga (orang tua, kakak, dsb) tentang nilai-nilai, norma-norma yang dianut oleh keluarga dan masyarakat yang lebih luas, dan ada akhirnya si anak tersebut dapat bertingkah laku sesuai dengan ajaran keluarganya.

Subsistem sosial terdiri dari unsur-unsur status-status dan peranan-peranan sebagai pembagian dari fungsi-fungsinya, sehingga penampilan perilaku individu harus sesuai dengan status dan peranan yang dimilikinya. Unsur lain ialah tingkatan sosial (*social rank*) yang dalam proses pemangkatannya (*ranking*) menyangkut evaluasi terhadap individu-individu dan alokasi status-status dan peranan-peranan. Kemudian adanya unsur kekuasaan (*power*) yang dalam prosesnya merupakan fungsi pengawasan (*controll*) dan secara elemental merupakan proses pengambilan keputusan dan inisiasi tindakan-tindakan. Selain itu adanya unsur sanksi (*sanction*) yang berfungsi bagi konformitas (ketaatan) terhadap unsur-unsur normatif dan bagi keseragaman (*uniformity*) dalam tindakan-tindakan; proses elementalnya antara lain ialah pemberian ganjaran (*reward*) bagi yang mentaati dan hukuman (*punishment*) bagi mengingkari. Terakhir, adanya unsur kemudahan-kemudahan (*facilities*) bagi tindakan pencapaian tujuan yang menyangkut tata-cara atau aturan kegunaan dan pengaturan kegunaan dan pengaturan penggunaan kemudahan-kemudahan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anggota-anggota keluarga dituntut untuk melakukan peranannya sesuai dengan statusnya. Misalnya, suami sebagai kepala keluarga dituntut melakukan perannya sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, sementara istri dituntut untuk menjalankan peranannya sebagai pendidik utama anak-anaknya.

Merton (1956) mengemukakan bahwa peranan berarti sebagai perilaku seseorang dalam memenuhi hak-hak serta kewajiban-kewajibannya, sehubungan dengan posisi sosialnya. Dalam keterangan lain, Merton memberikan batasan terhadap peranan, sebagai kumpulan pola tindakan tertentu yang harus diwujudkan seseorang dalam struktur sosial tertentu. Batasan-batasan demikian telah memberikan gambaran tentang seperangkat peranan yang dimainkan seseorang, masing-masing akan mencakup beberapa hal: (1) posisi atau status seseorang dalam struktur sosial tertentu; (2) persepsi bagaimana seseorang memainkan peranannya, serta bagaimana dia harus bertindak dan berbuat atas dasar pandangan tersebut; (3) tata cara seseorang memainkan peranannya; dan (4) berbagai harapan yang muncul dalam masyarakat terhadap peranannya yang dimainkan seseorang.

Dalam hubungannya dengan status dan peranan anggota keluarga dan rumah tangga oleh Levy (1971:1-60) dengan teori "Analisa Struktur dan Fungsional" berasumsi bahwa mantapnya keluarga sebagai sistem sosial, dapat dianalisa ke-lima fungsi yang saling berkaitan walaupun masing-masing mempunyai fungsi otonomi. Kelima fungsi tersebut adalah: (1) Diferensiasi peranan; (2) Alokasi ekonomi; (3) Alokasi kekuasaan; (4) Alokasi solidaritas; (5) Alokasi integrasi dan ekspresi.

Diferensiasi peranan adalah cara mendudukan seseorang kerabat pada posisi tertentu dalam sistem kekerabatan menurut fungsinya masing-masing, dengan mempertimbangkan perbedaan umur, seks, posisi ekonomi dan pembagian kekuasaan. Perbedaan posisi pria dan wanita dalam keluarga hanya sebagian yang disebabkan oleh alasan-alasan biologis yang didasarkan atas lemah atau kuatnya fisik. Pertimbangan lebih penting berasal dari pola sosial budaya, yang menentukan siapa yang meraja dalam sistem kekerabatan, siapa yang

mengasuh dan mendidik anak, siapa yang mencari nafkah, siapa yang tampil pada kegiatan-kegiatan ritual dan lain sebagainya. Dengan demikian differensiasi peranan erat hubungannya dengan kerja.

Alokasi ekonomi dalam suatu sistem kekerabatan diperlukan mengingat konsumsi anggota-anggotanya akan barang dan jasa (makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain) yang harus diperoleh karena usaha produksi anggota-anggotanya pula. Disini akan nampak siapa yang ikut serta dalam mendatangkan pendapatan.

Mengenai sumber penghasilan dari usaha produktif (mencari nafkah), Levy (1971:23-28) menyatakan pentingnya membedakan: (a) apakah karena usaha seseorang (petani, pengusaha kerajinan rumahtangga) atau beberapa anggota rumahtangga yang menggabungkan diri dalam kesatuan-kesatuan produktif/pencaharian nafkah di luar keluarga (buruh upahan); dan (b) apakah hasil dari usaha produktif atau mencari nafkah (barang dan jasa) diusahakan untuk dikuasai langsung oleh keluarga/rumahtangga itu sendiri atautkah diusahakan untuk pihak luar dengan menghasilkan uang dari padanya untuk dibelikan barang dan jasa bagi konsumsi keluarga tersebut: hal pertama yang "*self sufficient*" sudah jarang ada; dalam hal yang kedua adalah umum, dimana masih tetap ada sebagian yang diusahakan untuk langsung dikonsumsi sendiri. Pendapat ini sesuai pendapat Nickell, Dorsey dan Budolfson (1973: 211-226), yang menyatakan tentang manajemen pendapatan baik yang diperoleh dari anggota rumahtangga sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok keluarga.

Dalam hal konsumsi pun keluarga mengenal pola-pola konsumsi yang merupakan sebagian dari kebudayaan, atau menunjuk suatu kelas ekonomi dalam masyarakat yang bersangkutan. Dapat terjadi bahwa semua penghasilan dari semua pencari nafkah dalam keluarga dikumpulkan menjadi dana bersama (antara lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota yang diakui), menurut pos-pos pengeluaran sesuai dengan norma-norma tingkat hidup keluarga itu. Pentingnya dalam hal-hal tersebut memperhatikan antara siapa-siapa dana bersama dibentuk, siapa yang menguasai dan bagaimana cara menjalankan wewenang itu.

Untuk kelangsungan keluarga sebagai grup, diperlukan pula fungsi alokasi kekuasaan antar pelaku. Menurut Blood dan Wolf (dalam Pudjiwati Sayogyo, 1983:41) untuk mengetahui status dan peranan anggota rumahtangga di dalam maupun di luar rumahtangga, perlu mengetahui distribusi serta alokasi kekuasaan karena merupakan hal yang paling mendasar dalam struktur keluarga. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang bisa tersebar dengan sama nilai (*equal*) dan tidak sama nilai (*unequal*). Berdasarkan pemikiran tersebut Pudjiwati Sajogyo (1983:201), mengemukakan lima tipe pengambilan keputusan yaitu: (1) pengambilan keputusan oleh suami sendiri, (2) pengambilan keputusan oleh istri sendiri, (3) pengambilan keputusan bersama setara, (4) pengambilan keputusan bersama istri dominan, dan (5) pengambilan keputusan bersama dominan.

Alokasi solidaritas, tingkat solidaritas yang didudukkan dalam berbagai hubungan antara anggota-anggota kerabat menurut maknanya dan kuatnya hubungan itu didalam hubungan itu apa yang menjadi daya tarik di dalamnya. Makna hubungan (misalnya: kasih sayang), antara siapa hubungan itu terjalin (misalnya ibu dan anak).

Kuatnya hubungan: hubungan macam mana yang lebih kuat dan didahulukan dari pada yang lain (suami, istri, orang tua, anak dan sebagainya), dan dalam keadaan apa. Daya tarik timbal balik: perasaan apa (hormat, takut dan sebagainya) yang perlu dihubungkan dengan sikap menghindar ataukah mendekatkan diri dengan merasa lain-lain. Dari segi solidaritas terdapat "ke dalam" (antara anggota-anggotanya) dan "ke luar" (orang luar, masyarakat besar) mana yang lebih dipentingkan, dalam hal apa, tergantung dari nilai-nilai masyarakat itu.

Fungsi integrasi dan ekspresi dalam sistem kekarabatan, di satu pihak meliputi proses sosialisasi si anak/anggota baru karena perkawinan, dipungut dan lain-lain yaitu cara mendidik dan memelihara nilai-nilai sikap dan tata cara sistem kekarabatan itu. Di lain pihak meliputi cara-cara bagaimana seseorang anggota kerabat dibenarkan menyatakan diri, sebagai reaksi atas berbagai soal yang mengenai dirinya (*expression*).

Subsistem kepribadian (*personality*) memperuntukkan penggolongan orientasi-orientasi pelaku. Secara umum orientasi seorang pelaku itu terdiri dari dua unsur dasar, yaitu orientasi motivasional dan orientasi nilai-nilai. Orientasi motivasional menunjuk kepada keinginan pelaku untuk memperbesar kepuasan dan sedapat mungkin mengurangi atau menghindari kerugian-kerugian; salah satu aspek dari orientasi ini ialah usaha untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kepuasan segera dan tujuan jangka panjang. Sedangkan orientasi nilai-nilai menunjuk kepada standar-standar normatif yang mengendalikan alternatif cara-cara pencapaian tujuan (*goal attainment*) dan yang menentukan prioritas kebutuhan dan tujuan yang berbeda.

Orientasi motivasional terdiri dari dimensi-dimensi *kognitif*, *cathectic*, dan *evaluatif*. Dimensi *kognitif* pada dasarnya menunjuk pada pengetahuan (*knowledge*) dan keyakinan (*belief*) pelaku akan situasi, khususnya yang berhubungan dengan bentuk-bentuk kebutuhan dan tujuannya; jadi mencerminkan kemampuan dasar manusia untuk membedakan macam-macam rangsangan (*stimulus*), dan untuk membuat generalisasi dari stimulus yang satu ke stimulus yang lainnya. Dimensi *Cathectic* menunjuk kepada tanggapan afektif (sentimen atau emosi) dari pelaku terhadap situasi atau terhadap berbagai aspek dari situasi tersebut; dimensi ini pun mencerminkan kebutuhan dan tujuan perseorangan. Dimensi *evaluatif* menunjuk pada dasar pilihan perseorangan terhadap dua pilihan, antara kognitif dan "*cathectic*".

Orientasi nilai terdiri dari dimensi-dimensi *kognitif*, *apresiatif* dan *moral*. Dimensi *kognitif* dalam hal ini menunjuk pada standar atau ukuran yang digunakan untuk menerima atau menolak berbagai interpretasi kognitif terhadap situasi. Dimensi *apresiatif* menunjuk pada standar atau ukuran-ukuran dalam mengungkapkan perasaan atau keterlibatan afektif (emosional). Dimensi *moral* menunjuk pada ukuran-ukuran abstrak yang digunakan untuk menilai bentuk tindakan yang harus dipilih dalam kaitannya dengan pengertian dalam keseluruhan sistem.

Subsistem perilaku organisme memiliki unsur tindakan (*action*), yang bersangkutan dengan proses aktivitas pencapaian tujuan dan bersamaan dengan aktivitas yang belum diketahui dan atau belum sesuai dengan norma (*concomitant latent activity*); subsistem ini merupakan adaptasi terhadap subsistem kepribadian. Hal ini pun memperhatikan sistem biologi (hormon dan biokimia) manusia.

## KERANGKA TEORITIK DAN HIPOTESIS



### 3.1. Kerangka Teoritik

Untuk memahami fenomena yang telah diungkapkan dalam latar belakang penelitian, dan agar dapat menjawab masalah penelitian yang telah diidentifikasi itu, maka semua itu akan didudukkan perkaranya dalam teori-teori yang termasuk dalam sudut pandang (wawasan) sistem (Paradigma Fakta Sosial) dan sudut pandang Individual (Paradigma Definisi Sosial) dan sudut pandang hubungan individu dengan lingkungannya (Paradigma Perilaku Sosial) (Ritzer, 1985). Dari hal-hal tersebut, maka topik yang muncul adalah keluarga/rumahtangga sebagai sistem sosial hubungannya dengan lingkungannya.

Pembangunan pangan dan perbaikan gizi adalah suatu upaya pembangunan yang bersifat lintas sektoral yang saling berkaitan, ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat secara adil dan merata baik dalam jumlah maupun mutu gizinya sehingga terpenuhi salah satu kebutuhan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus pembangunan pangan merupakan upaya mengembangkan sistem ketahanan pangan yang andal, mencakup rangkaian kegiatan interaksi yang saling terkait mulai dari kegiatan produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran pangan sampai di tingkat rumahtangga, untuk mencapai ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat baik jumlah, mutu maupun keragamannya.

Ketahanan pangan merupakan konsep yang multidimensioanl, yaitu berkaitan antar mata rantai sistem pangan dan gizi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi dan status gizi. Oleh karena itu indikator keahanan pangan rumahtangga dapat dicerminkan dari tingkat produksi, ketersediaan pangan pengeluaran pangan, fluktuasi harga, jumlah dan mutu konsumsi pangan serta status gizi (Suharjo, 1996).

Berbagai kebijakan dan program yang diarahkan kepada peningkatan ketahanan pangan yaitu kebijakan sistem produksi, perbaikan distribusi serta kebijakan harga yang tujuannya untuk melindungi petani sekaligus menjamin keterjangkauan harga pangan bagi semua lapisan masyarakat. Usaha-usaha tersebut dilakukan sebagai upaya memecahkan masalah ketahanan pangan (ketidaktahanan pangan) yang senantiasa terjadi, sehingga dapat dicapai kestabilan ketahanan pangan yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan masyarakat secara umum dan keluarga atau rumahtangga secara khusus. Dengan demikian timbul pertanyaan bagaimana keluarga atau rumahtangga sebagai sistem sosial dapat mempertahankan keseimbangannya. Hal ini akan dapat dipahami dengan berpijak pada teori "Sistem Sosial" yang dikemukakan oleh Parsons (1951).

Menurut Parsons, sistem sosial itu adalah tindakan sosial yang diatur dan cenderung mempertahankan keseimbangan sistem tersebut. Keterkaitan atau keseimbangan masyarakat menunjuk pada suatu keadaan di mana individu-individu mampu mengadaptasikan perilaku organismenya terhadap kepribadian pencapaian tujuan menurut pola-pola tingkahlaku terintegrasi. Hal ini dimungkinkan karena sebagai sistem sosial terdiri dari empat subsistem, yaitu subsistem kebudayaan (*culture*), subsistem sosial, subsistem kepribadian (*personality*) dan subsistem perilaku organisme. Keempat subsistem itu berturut-turut berfungsi bagi pertahanan pola tingkahlaku (*latency*), integrasi, pencapaian tujuan (*goal attainment*) dan adaptasi. Dua sistem yang pertama beserta fungsi-fungsinya berada pada tingkat masyarakat, dan dua subsistem kemudian juga beserta fungsi-fungsinya berada pada tingkat individu.

Subsistem budaya yang menyediakan tata-nilai, norma dan kaidah-kaidah sosial, mungkin diwujudkan dalam pepatah-pepatah atau falsafah-falsafah kehidupan, yang semuanya mengacu kepada tujuan yang hendak dicapai yang didasarkan pada pemeliharaan tapal batas tertentu (*boundary maintenance*) sedemikian rupa sehingga terbentuk sesuatu bagi ketahanan pola tingkahlaku (*latency*). Untuk kehidupan bersama secara terintegrasi dalam subsistem sosial, pola-pola tingkahlaku itu diaplikasikan pada unsur-unsurnya, seperti status dan peranan dalam kepangkatan sosial (*social rank*) yang disertai dengan kekuasaan (*power*) dan sanksi-sanksi sosial (*reward & punishment*), serta ditunjang oleh fasilitas-fasilitasnya.

Kedua subsistem masyarakat beserta fungsi-fungsinya itu disosialisasikan kepada individu melalui proses-proses komunikasi dan kendali sosial, sedemikian rupa sehingga melembaga (*institutionalized*) serta membatin (*internalized*) yang akhirnya menjadi kepribadian (*personality*) individu. Hal ini akan membentuk kekuatan motivasional dalam keyakinan atau kepercayaan (*belief*) dan rasa-perasaan (*sentiment-emotional*), yang berfungsi bagi penilaian dalam pemilihan alternatif tindakan pencapaian tujuan (*goal attainment*) itu.

Subsistem kepribadian individu "memaksakan" organisme individu untuk mengadaptasikan perilakunya pada perilaku sosial yang telah menjadi kepribadiannya itu. Dalam proses adaptasi ini akan terjadi ketegangan-ketegangan, karena tidak ada keserasian antara harapan dengan kemampuan melaksanakannya; namun hal ini tidak akan frustrasi jika disertai dengan kemampuan reaksi (*strain*) menurut pertalian sistem (*systemic linkage*).

Untuk memahami ketahanan pangan di tingkat rumah tangga ditelaah berdasarkan teori "Sistem Sosial" dengan empat sub sistem (budaya, sosial, kepribadian dan organisme perilaku) beserta prasyarat fungsi-fungsinya (latensi, integrasi, pencapaian tujuan dan adaptasi) dimana keempat prasyarat fungsi tersebut saling terkait.

Subsistem budaya dengan fungsi latensi menunjuk pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai

dengan beberapa aturan atau norma-norma. Dalam hubungannya dengan ketahanan pangan sebagai unsur penting dalam menciptakan kestabilan (fungsi pemeliharaan) dalam masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat sebagai hasil sosialisasi yang dalam hal ini hubungannya dengan kebutuhan paling dasar bagi kehidupan manusia yaitu pangan. Untuk itu, ketahanan pangan sangat ditentukan oleh peranan rumahtangga, masyarakat secara luas dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan serta mekanisme pasar dalam menjalankan nilai-nilai atau norma-norma (aturan-aturan) dan unsur budaya yang lain (pengetahuan pangan dan gizi, tingkat pengetahuan dan penggunaan teknologi) dalam upaya pemeliharaan ketersediaan pangan secara terus-menerus oleh semua lapisan masyarakat.

Subsistem sosial dengan Fungsi Integrasi terdiri dari unsur-unsur status-status dan peranan-peranan sebagai pembagian dari fungsi-fungsinya yang fungsional, sehingga penampilan individu harus sesuai dengan status dan peranan yang dimilikinya. Unsur lain ialah pangkat sosial atau tingkatan sosial yang dalam proses pemangkatannya menyangkut evaluasi terhadap individu-individu dan alokasi status-status dan peranan-peranan. Kemudian adanya unsur kekuasaan yang dalam prosesnya merupakan fungsi pengawasan dan secara elemental merupakan proses pengambilan keputusan dan inisiasi tindakan-tindakan. Fungsi Integrasi dapat dipenuhi melalui komunitas sosial. Dalam hubungannya dengan ketahanan pangan, fungsi ini dapat dianalisa secara makro dalam artian bagaimana pemerintah dan masyarakat umum dalam menjalankan peranannya sesuai dengan statusnya. Secara mikro (rumah tangga), dapat dianalisa melalui keluarga/rumah tangga sebagai subsistem masyarakat melalui peranan masing-masing anggota keluarga sesuai dengan statusnya, misalnya bagaimana peranan suami dan istri dalam proses produksi, distribusi pangan, pengolahan, dan sebagainya hubungannya dengan ketahanan pangan rumah tangga. Dalam hubungan dengan peranan anggota rumah tangga, Levy (1971:1-60) mengemukakan bahwa untuk melihat keutuhan atau mantapnya suatu keluarga/rumah tangga dapat ditelaah berdasarkan teori "Struktur Fungsional" dengan fungsi-fungsi yaitu:

deferensiasi peranan, alokasi ekonomi, alokasi kekuasaan/kewibawaan, alokasi solidaritas dan alokasi integrasi dan ekspresi. Fungsi-fungsi tersebut secara otonomi bekerja menurut tugasnya sendiri-sendiri, namun sebagai suatu sistem sosial fungsi-fungsi tersebut terkait dan terkoordinasi.

Dalam penelitian ini dianalisis tiga fungsi yaitu: (a) diferensiasi peranan menunjuk pada pola peranan yang menyangkut pembagian kerja khususnya suami istri dalam hubungannya dengan ketahanan pangan yang diukur dengan curahan kerja, (b) alokasi ekonomi yaitu peranan anggota rumahtangga dalam ekonomi keluarga dilihat dari pendapatan yang disumbangkan terhadap pendapatan rumahtangga, dan (c) alokasi kekuasaan, yaitu peranan anggota rumahtangga dalam pengambilan keputusan.

Subsistem Kepribadian dengan Fungsi Pencapaian Tujuan memperuntukkan penggolongan orientasi-orientasi pelaku. Secara umum orientasi seorang pelaku itu terdiri dari dua unsur dasar, yaitu orientasi motivasional dan orientasi nilai-nilai. Orientasi motivasional menunjuk kepada keinginan pelaku untuk memperbesar kepuasan dan sedapat mungkin mengurangi atau menghindari kerugian-kerugian; salah satu aspek dari orientasi inilah usaha untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kepuasan segera dan tujuan jangka panjang. Sedangkan orientasi nilai menunjuk kepada standar-standar normatif yang mengendalikan alternatif cara-cara pencapaian tujuan dan yang menentukan prioritas kebutuhan dan tujuan yang berbeda.

Orientasi motivational terdiri dari dimensi-dimensi *kognitif*, *cathectic*, dan *evaluatif*. Dimensi kognitif pada dasarnya menunjuk pada pengetahuan dan keyakinan pelaku akan situasi, khususnya yang berhubungan dengan bentuk-bentuk kebutuhan dan tujuannya; jadi mencerminkan kemampuan dasar manusia untuk membedakan macam-macam rangsangan (*stimulus*), dan untuk membuat generalisasi dari stimulus yang satu ke stimulus yang lainnya. Dimensi "*cathectic*" menunjuk kepada tanggapan afektif (sentiment atau emosi) dari pelaku terhadap situasi atau terhadap aspek dari situasi tersebut; dimensi ini pun mencerminkan kebutuhan dan tujuan perseorang. Dimensi

evaluatif menunjuk pada dasar pilihan perseorangan terhadap dua pilihan, antara *kognitif* dan *cathectic*.

Orientasi nilai terdiri dari dimensi-dimensi pengetahuan, apresiasi dan moral. Dimensi pengetahuan dalam hal ini menunjuk pada standar atau ukuran yang digunakan untuk menerima atau menolak berbagai interpretasi pengetahuan terhadap situasi.

Dimensi apresiasi menunjuk pada standar atau ukuran-ukuran dalam mengungkapkan perasaan atau keterlibatan afektif (emosional). Dimensi moral menunjuk pada ukuran-ukuran abstrak yang digunakan untuk menilai bentuk tindakan yang harus dipilih dalam kaitannya dengan pengertian dari keseluruhan sistem. Dengan demikian unsur-unsur kepribadian (orientasi motivasi dan orientasi nilai dengan berbagai dimensi) sangat menentukan ketahanan pangan rumah tangga, hal ini dapat dilihat misalnya dimensi pengetahuan dan kepercayaan tentang motivasi kerja dan motivasi konsumsi pangan dan lain sebagainya akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga.

Dalam hubungannya dengan motivasi kerja, menurut Gassong's (1973:521-538), orientasi nilai kerja dalam bekerja (berusahatani) terdiri dari nilai instrumental (pekerjaan sebagai alat untuk memperoleh pendapatan dan keamanan); sosial (pekerjaan dipandang sebagai alat yang dapat memelihara hubungan dengan sesama anggota masyarakat); ekspresif (pekerjaan dianggap sebagai alat untuk mengekspresikan diri); dan intrinsik (pekerjaan sebagai hal yang hakiki bagi dirinya). Hasil penelitian Austin, et al (1996), menemukan bahwa orientasi nilai (motivasi) kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi (pendidikan, penguasaan sumberdaya lahan & modal, pendapatan, dan sebagainya).

Dalam mengkonsumsi pangan, nilai atau motivasi yang melatarbelakangi manusia dalam memilih makanan agar dapat bekerja dan sehat, Sementara itu 'sikap' pada diri seseorang dipengaruhi oleh 'nilai-nilai kepercayaan' dan 'kebutuhan-kebutuhannya'. Semua unsur tersebut pada gilirannya bermuara pada perilaku seseorang terhadap makanannya.

Selanjutnya Krondl dan Lau, 1985 (dalam Susanto, 1996) mengemukakan berbagai faktor yang mempengaruhi cara-cara seseorang memilih makanannya. Kedua ilmuwan itu membagi faktor-faktor tersebut ke dalam tiga golongan besar, yakni: (a) Faktor Endogen, meliputi: keturunan, jenis kelamin, umur, kegiatan; (b) Faktor Eksogen, meliputi: sosial-budaya, ciri masyarakat dan sistem ekonomi; dan (c) Persepsi/Wawasan, meliputi: pengetahuan, kepercayaan, menyenangkan, harga, prestige, dikenal, rasa/selera, toleran. Sementara itu 'sikap' pada diri seseorang dipengaruhi oleh 'nilai-nilai kepercayaan' dan 'kebutuhan-kebutuhannya'. Semua unsur tersebut pada gilirannya bermuara pada perilaku seseorang terhadap makanannya.

Subsistem Perilaku Organisme dengan Fungsi Adaptasi menunjuk pada kemampuan sistem menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem yang mana kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui "sistem ekonomi". Subsistem ini memiliki unsur tindakan (*action*), yang bersangkutan dengan proses aktivitas pencapaian tujuan dan bersamaan dengan aktivitas yang belum diketahui dan atau belum sesuai dengan norma; subsistem ini merupakan adaptasi terhadap subsistem kepribadian. Dalam hubungannya dengan ketahanan pangan rumahtangga subsistem perilaku organisme dengan fungsi adaptasinya mempengaruhi ketahanan pangan rumahtangga, karena sistem ekonomi berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumahtangga. Sistem ekonomi berhubungan dengan sistem produksi, tingkat pendapatan, tingkat harga pangan, selera dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dalam mempermasalahkan ketahanan pangan rumahtangga, selain dipengaruhi oleh faktor dalam rumahtangga, juga dipengaruhi oleh faktor luar rumahtangga, untuk itu dalam upaya menelaah ketahanan pangan rumahtangga Teori Sistem yang dikembangkan secara dinamis oleh Ohama (2000) dapat pula dijadikan landasan berpikir. Ohama menyatakan bahwa Sistem Masyarakat Lokal dikonstruksi oleh sistem triagonal yang menghubungkan empat pelaku atau subsistem yakni yang saling terkait yaitu: (1) rumahtangga

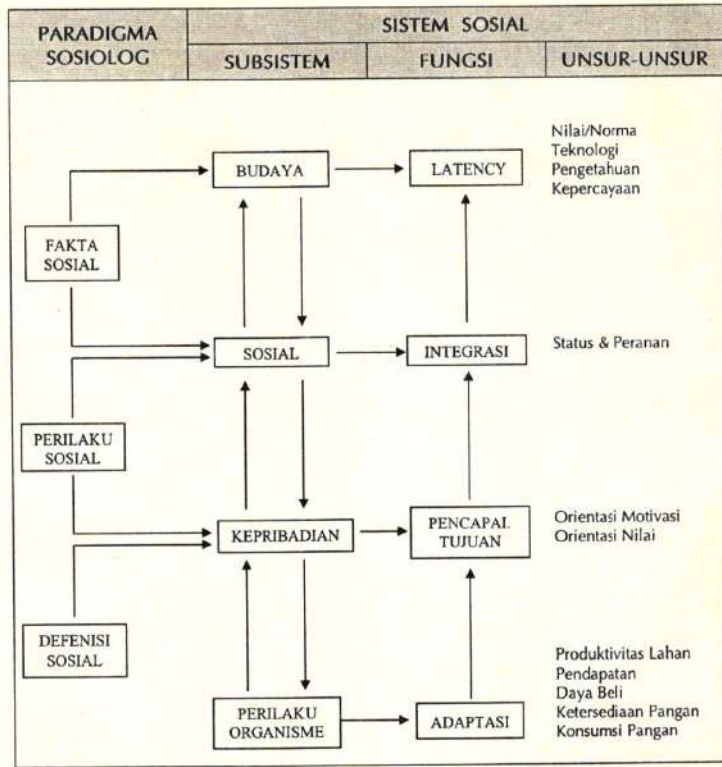
(*household*); (2) sistem komunitas lokal (*local community system*) yang merupakan jaringan interaksi sejumlah rumahtangga; (3) sistem administrasi lokal (*local administration*) pemerintah; dan (4) sistem pemasaran lokal (*local market*). Rumahtangga dan komunitas lokal dapat dipandang sebagai sistem dalam (*inner system*) dari sistem masyarakat lokal, sedangkan sistem administrasi lokal dan sistem pasar lokal merupakan sistem luar (*outer system*). Interaksi sistem dalam dan sistem luar ini yang menjadi totalitas dari sistem masyarakat lokal (*societal system*).

Jaringan interaksi antar rumahtangga menghasilkan suatu unit sosial yang dapat disebut sebagai komunitas lokal. Komunitas lokal dalam kaitannya dengan ketahanan pangan ini menyediakan basis sosial bagi individu anggota rumahtangga untuk berinteraksi satu sama lain bagi pemenuhan kebutuhan produksi dan konsumsi mereka. Interaksi tersebut berlangsung dalam bentuk saling mendukung di antara anggota masing-masing rumahtangga atau melembagakan suatu organisasi sosial

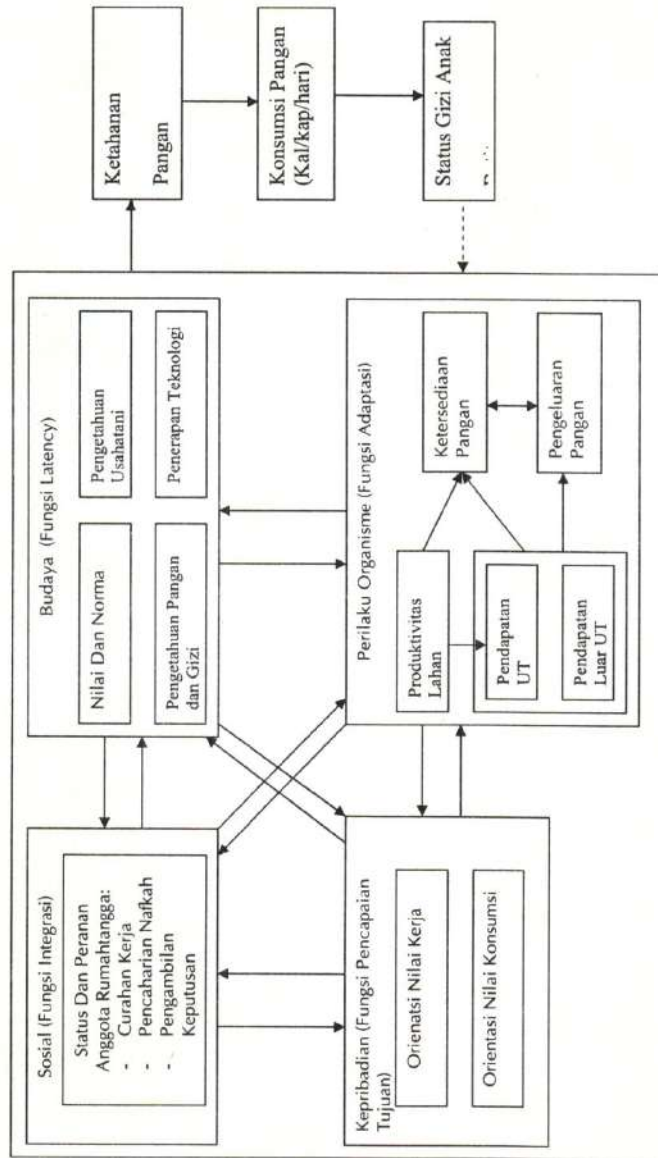
Pada sistem administrasi lokal, dalam hubungannya dengan ketahanan pangan apakah pemerintah dapat menyediakan bagi warganya berbagai program yang ada kaitannya dengan proses produksi, konsumsi, harga pangan. Sedangkan pada sistem pemasaran yang menjadi pokok pertimbangan adalah jangkauan pasar bagi produk-produk lokal, termasuk akses informasi pemasaran dan ketersediaan sarana fisik, cara penetapan harga bagi produk-produk lokal, distribusi dan kebijakan harga pangan dipasar

Dengan berfungsinya ke empat subsistem (budaya, sistem sosial, kepribadian dan perilaku organisme) dengan prasyarat fungsi-fungsinya (*Latency, Integration, Goal-Attainment dan Adaptation*) sebagaimana diuraikan di atas, berarti bahwa pendekatan tersebut mampu memberikan suatu gambaran ketahanan pangan rumahtangga.

Untuk lebih memudahkan memahami kerangka pemikiran tersebut, secara skematis dapat dilihat pada skema 1 dan 2 di bawah ini.



Skema 1. Paradigma Sosiologi dan Sistem Sosial



Skema 2: Kerangka Pikir Ketahanan Pangan pada Sistem Rumahtangga

## 1.2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka hipotesis utama dalam penelitian adalah: (1) Ketahanan pangan pada 3 tipe agroekosistem berbeda; (2) Ketahanan pangan rumahtangga lebih terjamin pada rumahtangga yang memiliki pendapatan, daya beli, ketersediaan tinggi dibanding dengan rumahtangga yang memiliki daya beli, ketersediaan dan konsumsi rendah; (3) faktor sosial-budaya mempengaruhi ketahanan pangan rumahtangga. Untuk pengujian hipotesis utama tersebut, perlu diuraikan menjadi hipotesis-hipotesis kerja sebagai berikut:

1. Produksi pangan (padi), pendapatan rumahtangga, ketersediaan pangan dan pengeluaran pangan (daya beli pangan) mempengaruhi ketahanan pangan.
2. Motivasi kerja dan motivasi konsumsi mempengaruhi ketahanan pangan rumahtangga.
3. Curahan kerja anggota rumahtangga dalam rumahtangga dan pencaharian nafkah, peranan dalam pencaharian nafkah dan pengambilan keputusan mempengaruhi ketahanan pangan rumahtangga
4. Norma-norma pangan, pengetahuan pangan dan gizi, tingkat pengetahuan usahatani serta tingkat penggunaan teknologi usahatani/penangkapan ikan mempengaruhi ketahanan pangan rumahtangga
5. Konsumsi pangan dan status gizi anak batita berhubungan dengan ketahanan pangan rumahtangga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, S.M., H. Syarif, D. Sukandar, dan M. Latifah, 1995. *Laporan Studi Identifikasi Daerah Rawan Pangan*. Proyek Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi, Departemen Pertanian-Jurusan GMSK, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Adi, Anis Catur. 1998. *Konsumsi dan Ketahanan Pangan Rumahtangga Menurut Tipe Agroekologi di Wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur*. Tesis. Pascasarjana IPB. Bogor.
- Azis. 1990. *Agriculture for the 1990's*, Development Center Studies, OECD, Paris. Dalam Majalah Pangan, Vol. 1. No.1, 1996.
- Aman, Beddu. 1995. *Kebijaksanaan Pangan Nasional*. PT.Dharma Karsa Utama, Jakarta.
- Amin, Moh., P.Suharto dan Agus Saifullah, 1998. *Konsep dan Kebijakan Penanganan Masalah Rawan Pangan*, Prosiding Widyakarya Pangan dan Gizi, LIPI, Jakarta.
- Arikunto, Suhartini. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- BAPENNAS. 2000. *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)*, Jakarta.

- Biro Perencanaan Departemen Pertanian-UNICEF.1996. *Panduan Lokakarya Ketahanan Pangan Rumahtangga*, Jogjakarta.
- Biro Perencanaan Departemen Pertanian-Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi. 1996. *Telaahan Pola Pangan Harapan Regional*. Laporan LP-IPB.
- BPS.1998. *BPS Perkiraan Penduduk Miskin 79,4 juta*, dalam Harian Umum Republika, Jumat 3 Juli 1998.
- BPS. 1998. *BPS Sulawesi Selatan: Perkiraan Penduduk Miskin Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang.
- Baliwati, Yayuk Farida. 2001. *Model Evaluasi Ketahanan Pangan Rumahtangga Petani (Desa Sukajadi, Ciomas)*. Disertasi. Pascasarjana IPB.
- Departemen Pertanian. 2000. *Kebijakan dan Program Utama Pembangunan Pertanian.*, Jakarta.
- Dinas Pertanian Pangan Sulawesi Selatan. 1997. *Hasil Analisis Pola Konsumsi Sul-Sel*. Ujung Pandang.
- Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. 1981. *Daftar Komposisi Bahan Makanan*. Bharata Karya Aksara-Jakarta.
- Ditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura Deptan-Fakultas Pertanian IPB. 2000. *Rumusan Diskusi Pakar: Arah Pembangunan Tanaman pangan dan Hortikultura*. Prosiding , Jakarta.
- Erwidodo, Handewi P.Saliem, Mewa Ariani dan Ening Ariningsih. 1999. *Pengkajian Diversifikasi Konsumsi Pangan Utama Di Indonesia*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Deptan, Bogor.
- Elisabeth, Austin J., Desry J.Ian, Gibson J. Gavin, McGregor J.Murray, dan Dent Barry J. 1996. *Attitudes and value of Scottish Farmers "Yeomen" and "Entrepreneur" as Factors, Not Distinct Types*. Rural Sociology, Volume 61, No.3. Washington University.
- F.A.O. 1996. *Food Security: A domestic approach*. Development Education Exchange Papers.

- F A O. 1996. *Food Security: Some Macroeconomic Dimensions*. Journal The State of Food And Agriculture. Rome.
- F A O. 1998. *Assessment Of The World Food Security Situation*. Committee On World Food Security. Rome.
- F A O. 1998. *Guidelines For National Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems (Fivims): Background and Principles*. Committee On World Food Security. Rome.
- Gassong, Ruth. 1973. *Goal and values of Farmers*. Cambridge University.
- Gittinger, P. J., Leslie, J. Hoisington, C. 1987. *Food Policy: Integrating Supply, Distribution, and Consumption*. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London.
- GBHN. 1999. *Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999*, MPR RI. Jakarta.
- Goode, William J. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Bina Aksara. Jakarta.
- Gujral, Sunder dan Pant, Ira, 1988. *Household Food System*. The University of Illinois. USA.
- Hidayat, Syarif. 1997. *Perspektif Pembangunan SDM Untuk mendukung Pengembangan IPTEK di Bidang Pangan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat*. Makalah. Bagian Proyek Pengembangan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Direktorat Binlitabmas-Ditjen Dikti-Depdikbud. Jakarta.
- Hardinsyah, Dodik Briawan, Siti Madanijah, Cesilia Meti Dwiriani, Sumali M. Atmojo dan Yayat Heryanto. 1998. *Kelembagaan Untuk Pemantapan Ketahanan Pangan*. Laporan. Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi. LP-IPB.
- , Drajat Martianto, Hartoyo, Dodik Briawan, CM. Dwiriani, dan Budi Setiawan. 1999. *Membangun Sistem Ketahanan Pangan Yang Tangguh*. Majalah Pergizi pangan Indonesia (Prosiding).

- Horton, B. Paul dan Hunt L. Chester. 1987. *Sosiologi*. Alih Bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Erlangga. Jakarta.
- Hosmer, D.W. dan Stanley Lameshow. 1989. *Applied Logistic Regression*. A Wiley-Interscience Publication New York.
- Hambali, Abdul Malik. 1997. *Telaah Ulang Program Pangan dan Gizi Pelita VI Memasuki Pelita VII Di Sulawesi Selatan*. Makalah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Ujung Pandang.
- Hastuti, Endang Lestari. 1995. *Pelebagaan Perilaku Pangan dan Gizi*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Deptan. Bogor.
- Hasan, Ibrahim. 1995. *Aku Cinta Makanan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan*. Pengarahan Pada Kursus Penyegar Ilmu Gizi dan Kongres PERSAGI X. Bandung.
- 1998. *Sambutan Pengarahan Pada Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi*. LIPI. Jakarta.
- Johson, Doyle Paule. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern: Merton dan Fungsional Taraf-Menengah*. Gramedia. Jakarta.
- Joachim, V.B., Howarth Bouis, Shubh Kumar dan Rajul Pandya-lorch, 1992. *Food Security of The Poor*. International Food Policy Research Institut, Washington, D.C.
- Kantor Menteri Negara Urusan Pangan 1996. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan*. Jakarta.
- Kanwil Depkes Prop. Sul-Sel. 1999 *Rekapitulasi Laporan Temuan Kasus Kwashioskor dan Marasmus di Dati II Se Sulawesi Selatan*. Makassar.
- Kleinbaum., D.G. 1992. *Logistic Regression: A Self-Learning Text*. Springer New York.
- Koentjaraningrat. 1981. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat. Jakarta.

- Konandreas, Panos., Huddleston, Barbara., Dan Ramangkura, Virabongsa. *Food Security: An Insurance Approach*. International Food Policy Research Institute.
- Kasryno, Faisal. 1997. *Peranan Kebijakan Pengendalian Harga Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Indonesia*. Dalam 30 Tahun Peran Bulog Dalam Ketahanan Pangan. Bulog-Jakarta.
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi-UI.1980. *Buku Pegangan Bidang Kependudukan*. Jakarta.
- Levy, M.J. 1971. *The Family Revolution In Modern China*, Octagon Book. New York.
- Lobao, Linda M dan Thomas, Pamela. 1992. *Attitudes Toward Food Security and Genetic Engineering*. Journal Rural Sociology. Volume 57. No. 4. Montana State University.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 1993. *Risalah Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi*. Jakarta.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).1996. *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi*. Jakarta.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 1998. *Widyakarya Nasional Pangan dan gizi*. Jakarta.
- Manwan, Ibrahim., dan I.Oka. 1994. *Pemanfaatan Lahan Marjinal Untuk menunjang Diversifikasi Pangan dan Gizi*. Risalah Widya Karya Pangan dan Gizi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Mahyuddin. 1997. *Kajian Ketahanan Pangan Anggota POKMAS IDT Sulawesi Selatan*. Lembaga Penelitian UNHAS Makassar.
- Majalah Pangan. 1996. *Ketahanan Pangan Diberbagai Negara Berkembang dan Hubungannya Dengan Cadangan Pangan*. Jakarta.
- Maslow, A.H. 1984. *Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi Dengan Ancangan Hierarki Kebutuhan Manusia*. Gramedia. Jakarta.

- Merton, R.K. 1956. *Social Theory and Structure*. The Press Co. Inc. New York.
- Mosher, A.T. 1981. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. CV. Yasa Guna Jakarta.
- Murdock, George Peter. 1949. *Social Structure*. The Macmillan Company. New York.
- Nickell, Paulena, Dorsey, J. Muir, and Budolfson, Marie. 1963. *Management in Family Living*. United States of Amerika.
- Ohama, Yutaka. 2000. *Appropriate Supports to Promote Participatory Development*. The Government of Japan, JICA. Japan.
- Parsons, T. 1951. *The Social System*. Free Press. New York.
- Popkin, S.I. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy Of Rural Society In Vitnam*. University California Press.
- Poloma, Margaret M. 1987. *Sosiologi Kontemporer*. Yayasan Solidaritas Gadjah Mada.
- Pakpahan, Agus., Handewi P. Saliem, Sri Hastuti Suhartini; Niswar Syafa'at. 1992. *Penelitian Tentang Ketahanan Pangan Masyarakat Berpendapatan Rendah*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Deptan. Bogor.
- Ritzer, G. 1980. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyadur Alimandan, CV.Rajawali. Jakarta.
- Rusidi. 1989. *Dinamika Kelompok Tani Dalam Struktur Kekuasaan Masyarakat Desa Serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Usahatani Petani Berlahan Sempit dan Kekuatan Ikatan Patron- Klien*. Desertasi, UNPAD. Bandung.
- Sayogyo. 1989. *Jenis Pertanyaan Riset dan Model Yang Diacu: Beberapa Catatan*. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Scott, J.C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES Jakarta.
- Soekirman dan Idrus Jus'at. 1994. *Food And Nutritional Policies In The Sixth Five Year Development Plan. Food Self Sufficiency*. Bulog-Indonesia.

- Soekirman. 1996. *Ketahanan Pangan: Konsep, Kebijakan dan Pelaksanaannya*. Makalah pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumahtangga. Yogyakarta. Kerjasama Biro Perencanaan Departemen Pertanian dengan Unicef.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Suharjo. 1989. *Sosio Budaya Gizi*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. IPB.
- , 1996. *Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumahtangga*. Makalah pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumahtangga. Yogyakarta. Kerjasama Biro Perencanaan Departemen Pertanian dengan Unicef.
- , 1996. *Kajian Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Gizi*. Makalah, Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi-LP-IPB.
- Sumarwan, Ujang. dan Dadang Sukandar. 1998. *Analisis Ketahanan Pangan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga*. Media Gizi dan Keluarga. Jurusan GMSK, IPB-Bogor.
- Suryana, Ahmad. dan Joko Budianto. 1998, *Penawaran, Permintaan Pangan, dan Perilaku Kebiasaan Makan*. Prosiding Widyakarya Pangan dan Gizi, LIPI. Jakarta.
- , Tahlim Sudaryanto dan Sudi Mardianto. 1997. *Kebijakan Pembangunan Pertanian: Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Deptan-Bogor.
- , 2004. *Kemandirian Pangan Menuju Ketahanan Pangan Rumahtangga*, Kerjasama Bimas Ketahanan Pangan, Departemen pertanian dengan Harian Umum "Suara Pembaruan".
- Silitonga, Chrisman., Alim Fausi, M.Husain Sawit, Paimin Suharno, Achmad Soepanto, dan Mohammad Ismet. 1997. *30 Tahun Peran Bulog Dalam Ketahanan Pangan*. Bulog. Jakarta.

- Salman, Darmawan. 1999. *Tahap Transisi Dalam Transformasi Menuju Masyarakat Industri*. Proposal Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.
- Sawit, Husain., dan Tien Muhtadi. 1999. *Kebijakan Pangan Nasional: Keadaan Sekarang dan Arah Kedepan*. Makalah Round Table Discussion. Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura. Jakarta.
- Sugeng Setya Cahyanto, Bonifasius S.P dan Ataabik Muktaman, 2011. *Penguatan kearifan Lokal, Sebagai Solusi Permasalahan Ketahanan Pangan Nasional*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Susanto, Joko., dan Parsudi Suparlan. 1989. *Keanekaragaman Makanan Pokok di Indonesia dan Ketahanan Sosial dan Budayanya*. Prosiding Widyakarya Pangan dan Gizi. LIPI.
- 1996. *Aspek Pengetahuan dan Sosio Budaya Dalam Rangka Ketahanan Pangan Rumah tangga*. Makalah pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah tangga. Yogyakarta. Kerjasama Biro Perencanaan Departemen Pertanian dengan Unicef.
- Sutrisno, Nur. 1996. *Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan Rumah tangga*. Makalah pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah tangga. Yogyakarta. Kerjasama Biro Perencanaan Departemen Pertanian dengan Unicef.
- 1998. *Ketahanan Pangan*. Prosiding Widyakarya Pangan dan Gizi, LIPI. Jakarta.
- Sumarwoto, Otto. 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan. Bandung.
- Simatupang, Pantjar. 1999. *Kebijaksanaan Produksi dan Penyediaan Pangan*. Makalah Round Table Discussion. Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura. Jakarta.
- Sayogyo, Pudjiwati. 1982. *Modernisasi dan Perkembangan Sejarah Keluarga (The Family): Suatu Perspektif Mengenai Perubahan Sosial*. IKIP. Jakarta.

- , 1983. *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. CV Rajawali. Jakarta.
- Tabor S.R., Dillon, H.S., dan Sawit, M. Sawit. 1999. *Understanding The 1998 Food Crisis: Supply, Demand or Policy Failure*. Makalah. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, DEPTAN. Bogor.
- , Soekirman, Drajat Martianto. 2001. *Keterkaitan antara Krisis Ekonomi, Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Keadaan Gizi*. Prosiding Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VII. LIPI-Indonesia.
- Timmer, Peter C. 1993. *Building Institutions for Food Policy Analysis*. Institutional Aspect of Agrikultural Development. Bulog. Jakarta.
- Timothy R.F. dan Mc Caston, M.K. 1998. *The Household Livelihood Security Concept*. CARE USA.
- Tyagi, D.S. dan Vijay Shankar Vyas. 1990. *Increasing Access to Food*. Sage Publication. New Delhi/Newbury Park/London.
- Thaha, Abdul Razak. 1995. *Pengaruh Musim Terhadap Pertumbuhan Anak Keluarga Nelayan*. Disertasi. Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Vyas, Vijay Shankar. 1990. *Increasing Access to Food*. Sage Publications. New Delhi/Newbury Park/ London.
- Wolfensohn, James D. 1996. *Food Security For The World*. World Bank.
- Yoenus, Melati P., Darwis, Darmawan, Bulkis. 1994. *Kebiasaan Makan Masyarakat Pada Berbagai Sistem Ekologi di Sulawesi Selatan*. Laporan Penelitian. LP-Unhas.



## TENTANG PENULIS



**SITTI BULKIS**, lahir di Camba, Kabupaten Maros pada 29 Agustus 1961. Kini sebagai Guru Besar Sosiologi Pertanian pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian di Universitas Hasanuddin. Menjadi staf pengajar pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian UNHAS Sejak 1986. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD negeri I Camba pada Tahun 1972, Pendidikan Menengah Pertama diselesaikan di SMP Muhammadiyah Makassar 1975 dan Pendidikan Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri IV Makassar pada Tahun 1980. Pada 1985 menyelesaikan pendidikan di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UNHAS. Pada 1990 menyelesaikan pendidikan magister di IPB dan meraih doktor pada Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Pascasarjana UNHAS Tahun 2004. Minatnya dalam bidang ketahanan pangan dan gender, telah dimulai sejak mengambil pendidikan magister pada tahun 1987 sampai sekarang, hal ini dibuktikan dari kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan sebagian besar berhubungan dengan masalah ketahanan pangan dan gender. Dengan minatnya pada masalah gender, sebelum menjadi Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian UNHAS pada Akhir Tahun 2010, pada Tahun 2007-2010 dipercayakan menjadi Ketua Program Studi Gender dan Pembangunan pada Program Pascasarjana UNHAS. Buku Ketahanan Pangan Rumahtangga Perdesaan ini merupakan buku ke 2 ibu dari empat orang anak ini.

